



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MELALUI KINERJA KEUANGAN**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

**TESIS**

Oleh:

**ANANG ARIFUL HABIB**

**NIM. 150820301018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MELALUI KINERJA KEUANGAN**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)  
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

**Oleh:**

**ANANG ARIFUL HABIB**

**NIM. 150820301018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadaku, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

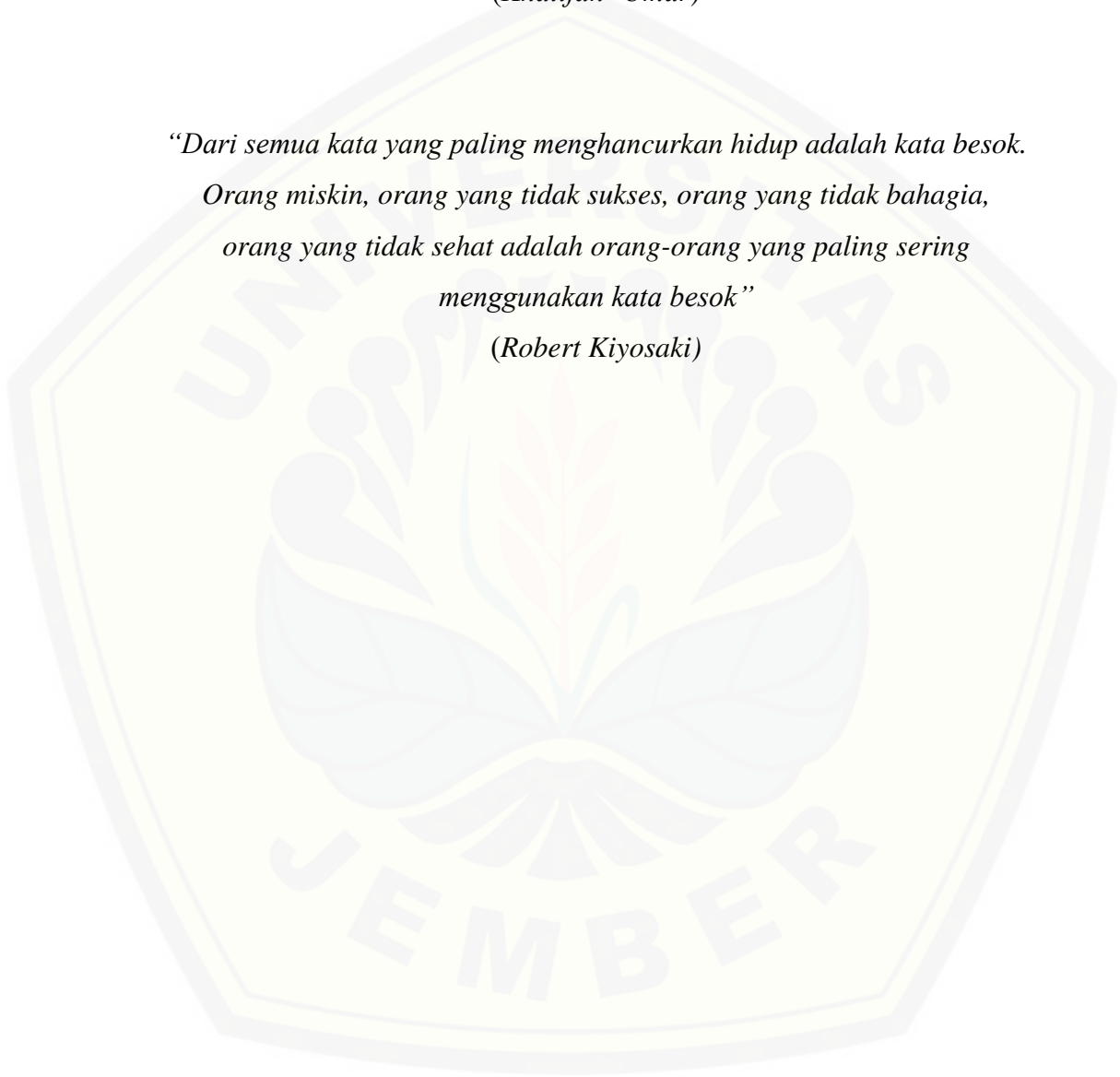
Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Ahmadi Fahman dan Ibunda Umi Zuhriyah tercinta, yang telah memberikan doa dan kasih sayang kepada saya selama ini;
2. Istri dan anakku, terima kasih atas dukungan dan motivasinya;
3. Bapak dan Ibu Guru dari TK sampai SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing, dan memberi ilmu yang berguna bagi kehidupanku;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang aku banggakan.

**MOTTO**

*Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar  
(Khalifah 'Umar)*

*“Dari semua kata yang paling menghancurkan hidup adalah kata besok.  
Orang miskin, orang yang tidak sukses, orang yang tidak bahagia,  
orang yang tidak sehat adalah orang-orang yang paling sering  
menggunakan kata besok”  
(Robert Kiyosaki)*



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anang Ariful Habib, S.E.

NIM : 150820301018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Melalui Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 05 Oktober 2020

Yang menyatakan,

**Anang Ariful Habib, S.E.**

NIM 150820301017

**TESIS**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MELALUI KINERJA KEUANGAN**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Oleh:

ANANG ARIFUL HABIB

NIM. 150820301018

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Tesis : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Melalui Kinerja Keuangan.

Nama Mahasiswa : Anang Ariful Habib

N I M : 150820301018

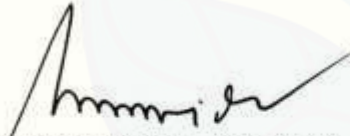
Jurusan : S – 2 Akuntansi

Hari, Tanggal :


Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota




Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA.  
NIP. 197107271995121001



Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com.  
NIP. 196408091990032001

Koordinator Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.,CA.  
NIP. 196608051992012001

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Melalui Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Disahkan pada

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

NIP. 196701021992032002

Anggota I

Anggota II

Dr. Wahyu Agus Winarno S.E., M.Sc., Ak.

NIP. 198308102006041001

Anggota III

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197809272001121002

Anggota IV

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.

NIP. 197107271995121001

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

NIP. 196408091990032001

Mengesahkan  
Universitas Jember

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.

NIP. 197107271995121001



## RINGKASAN

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Melalui Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia); Anang Ariful Habib, 150820301018; 98 Halaman; 2020; Jurusan Pasca Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu *financial*, *social*, dan *environmental* tidak hanya pada *single bottom line* (aspek *financial*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan hal ini perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), karena hanya dengan jaminan kondisi keuangan saja tidaklah cukup. Apabila sudut pandang sosial dan lingkungan diperhatikan oleh perusahaan, maka akan terjamin keberlanjutan perusahaan. Untuk itu perlunya CSR yang bersifat *mandatory* dari semula CSR hanya bersifat *voluntary*.

Program CSR dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat. Sehingga perusahaan dapat bertahan dan berkembang serta dapat meningkatkan profit dimasa yang akan datang. CSR memiliki hubungan erat dengan struktur kepemilikan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR. Menganalisis pengaruh tidak langsung kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR melalui kinerja keuangan perusahaan.

Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2017 – 2019, dengan populasi sejumlah 169 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yang kemudian memperoleh total 51 sampel perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap CSR, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR, komite audit berpengaruh signifikan terhadap CSR, dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap CSR.

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan tidak mampu memediasi antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran dewan komisaris, terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi variabel kinerja keuangan mampu memediasi antara komite audit terhadap pengungkapan CSR.

## SUMMARY

The Effect of Ownership Structure and Corporate Governance on Disclosure of Corporate Social Responsibility through Financial Performance (Studies on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange); Anang Ariful Habib, 150820301018; 98 Pages; 2020; Departement of Master of Accounting Faculty of Economics and Business University of Jember.

Corporate responsibility must be based on triple bottom lines, namely financial, social, and environmental, not only on the single bottom line (financial aspects). Corporate Social Responsibility (CSR) is an idea of corporate social responsibility. With this the company is able to grow in a sustainable manner, because only guaranteeing its financial condition is not enough. If the company takes into account the social and environmental perspectives, it will guarantee the company's sustainability. For this reason, it is necessary to have a CSR that is mandatory in nature from the beginning, CSR is only voluntary.

CSR programs are carried out by companies in the hope of gaining legitimacy and positive value from the community. So that the company can survive and develop and can increase profits in the future. CSR has a close relationship with the ownership structure, Good Corporate Governance (GCG), and the company's financial performance.

This study aims to analyze the direct effect of managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, size of the board of commissioners, and the audit committee on CSR disclosure. Analyze the indirect effect of managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, size of the board of commissioners and audit committee on CSR disclosure through the company's financial performance.

A quantitative approach is used in this research. The data analysis method used is path analysis. The population in this study are all manufacturing companies listed on the IDX in the period 2017 - 2019, with a population of 169

companies. The sampling technique used purposive sampling technique, which then obtained a total of 51 sample companies.

The results showed that managerial ownership had no effect on financial performance, institutional ownership had no effect on financial performance, foreign ownership had a significant effect on financial performance, board size had no effect on financial performance, audit committee had no effect on financial performance, managerial ownership had a significant effect on financial performance. CSR, institutional ownership has no effect on CSR, foreign ownership has no effect on CSR, board size has no effect on CSR, the audit committee has a significant effect on CSR, and financial performance has no effect on CSR.

The results of the indirect effect test show that the financial performance variable is unable to mediate between managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, and the size of the board of commissioners on CSR disclosure. However, the financial performance variable is able to mediate between the audit committee on CSR disclosure.

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kesehatan dan waktu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Melalui Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Penyusunan tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Pasca Sarjana (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, S.E., M.Si., Ak. selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menjadi pembimbing saya dan selalu sabar membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan semangat kepada saya. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan, kemudahan serta semangat yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah untuk bapak sekeluarga
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dan memberi saran, serta motivasi selama penyusunan tesis ini

5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia untuk membimbing penulis secara akademik mulai dari semester satu hingga lulus
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu ini bermanfaat di masa depan
7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ahmadi Fahman dan Ibu Umi Zuhriyah. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan juga doa yang tak henti – henti dipanjatkan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, serta rahmat-nya kepada mereka semua
8. Adik saya Arie Zainul Fathoni, Istri saya Ermawati dan anak saya Najwa Nuril Ilmi, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
9. Seluruh Teman – teman kuliah di Magister Akuntansi angkatan 2015, Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya perbuat selama ini
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah anda berikan. Penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini, dan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat pada kita semua.

Jember, 05 Oktober 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

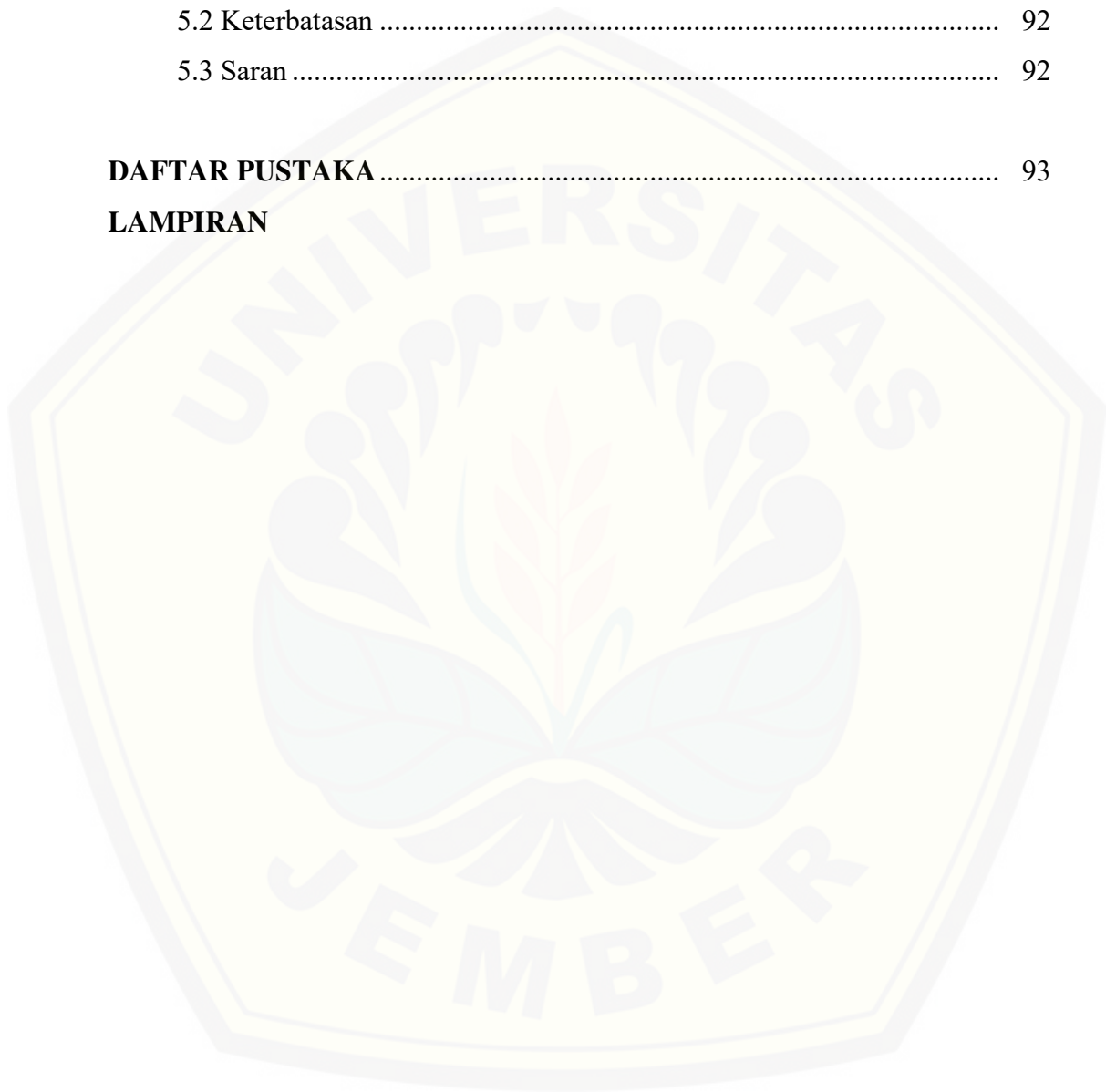
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1 Teori Agensi .....	15
2.2 Teori Legitimasi.....	16
2.3 Teori <i>Stakeholders</i> .....	18
2.4 Pengungkapan ( <i>Disclosure</i> ).....	19
2.5 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	20
2.6 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	25
2.6.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	26
2.6.2 Manfaat <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	27

2.6.3 Kepemilikan Manajerial .....	27
2.6.4 Kepemilikan Institusional.....	29
2.6.5 Kepemilikan Asing.....	30
2.6.6 Dewan Komisaris .....	30
2.6.7 Komite Audit.....	31
2.7 Kinerja Keuangan .....	32
2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
2.9 Pengembangan Hipotesis.....	43
2.9.1 Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan .....	43
2.9.2 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan.....	44
2.9.3 Kepemilikan Asing dan Kinerja Keuangan.....	45
2.9.4 Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan .....	46
2.9.5 Komite audit dan Kinerja Keuangan .....	47
2.9.6 Kepemilikan Manajerial dan CSR.....	48
2.9.7 Kepemilikan Institusional dan CSR .....	49
2.9.8 Kepemilikan Asing dan CSR.....	50
2.9.9 Ukuran Dewan Komisaris dan CSR.....	51
2.9.10 Komite audit dan CSR.....	52
2.9.11 Kinerja Keuangan dan CSR.....	53
2.10 Kerangka Konseptual .....	54
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	55
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	55
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	56
3.3.1 Variabel Terikat (Dependen).....	56
3.3.2 Variabel Bebas (Independent) .....	57
3.3.3 Variabel Intervening.....	58
3.4 Metode Analisis Data .....	59
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	59
3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	59
3.4.2.1 Uji Normalitas Data.....	59



3.4.2.2 Uji Multikolinearitas .....	59
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	60
3.4.2.4 Uji Autokorelasi .....	60
3.4.3 Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	61
3.4.4 Menghitung Jalur .....	62
3.4.5 Pengujian Hipotesis .....	64
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	66
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	68
4.3.1 Uji Normalitas Data.....	68
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	69
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	70
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	70
4.5 Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	71
4.6 Menghitung Jalur .....	74
4.7 Uji Hipotesis .....	75
4.8 Pembahasan .....	78
4.8.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan.....	78
4.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.....	79
4.8.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan.....	80
4.8.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan.....	81
4.8.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan.....	82
4.8.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap CSR.....	82
4.8.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap CSR .....	83
4.8.8 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap CSR .....	84
4.8.9 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap CSR.....	85

4.8.10 Komite Audit berpengaruh terhadap CSR.....	86
4.8.11 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap CSR .....	87
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Keterbatasan .....	92
5.3 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
<b>LAMPIRAN</b>	

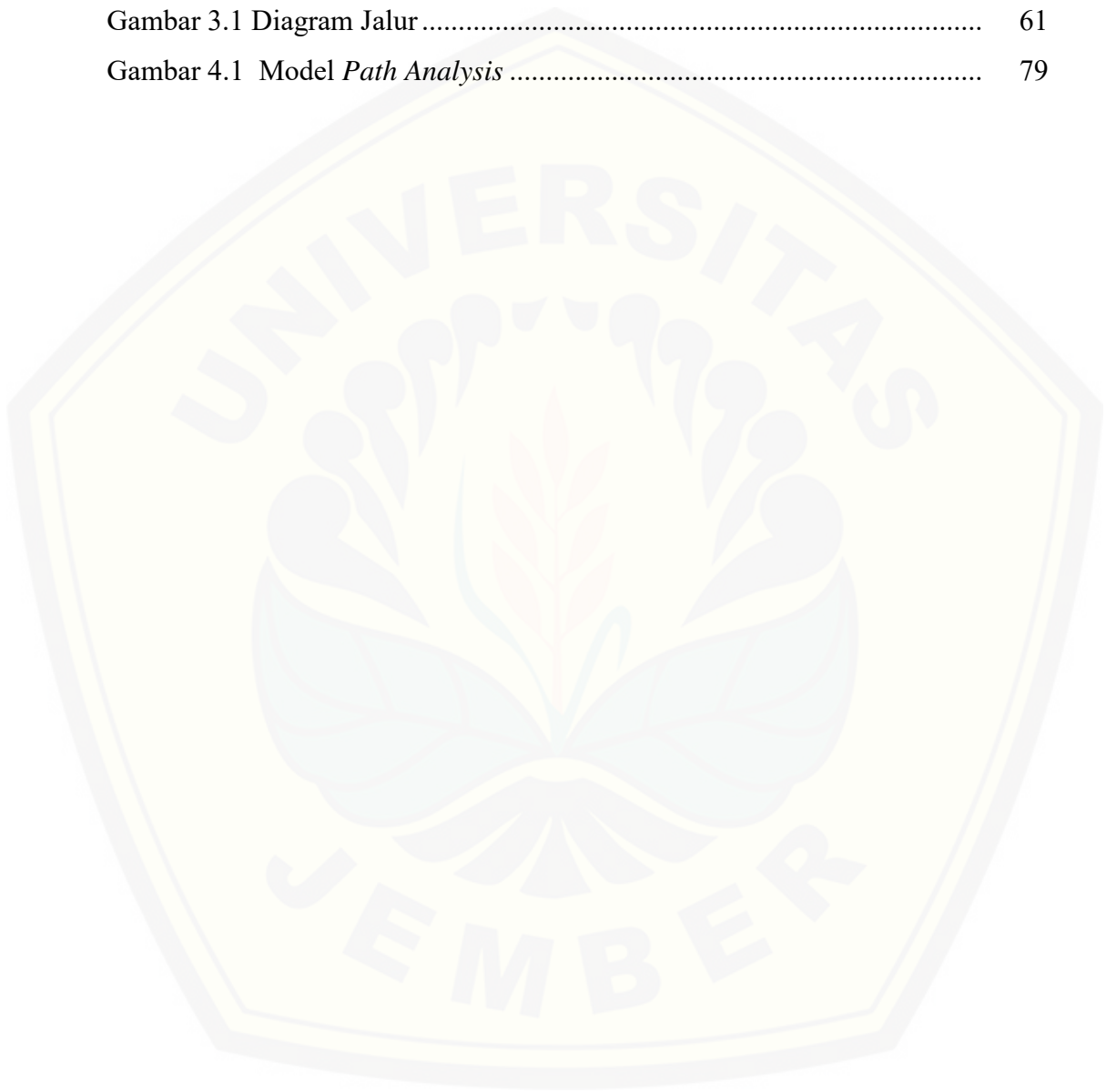


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 The Triple Bottom line of Corporate Social Responsibility .....	23
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Uji Durbin Watson <i>d</i> : Aturan pengambilan keputusan.....	60
Tabel 4.1 Proses Penarikan Sampel .....	65
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	66
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser .....	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	71
Tabel 4.7 Hasil Path Analysis Variabel .....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji t-test.....	76

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	54
Gambar 3.1 Diagram Jalur .....	61
Gambar 4.1 Model <i>Path Analysis</i> .....	79



## BAB 1. PENDAHULUAN

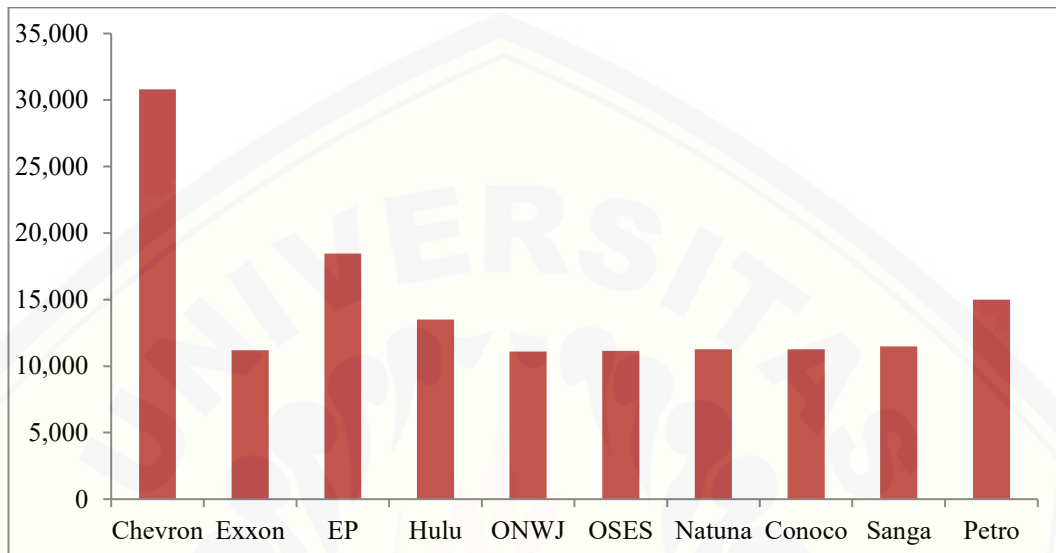
### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang saat ini sering menjadi topik utama pembahasan dunia, meskipun topik ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik juga dirasa penting. Hal ini lantaran tidak sedikit terjadi kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai dari limbah industri, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan. Produksi gas *chloro-fluoro-carbon* (CFC) berlebihan yang dihasilkan dari proses industri di negara maju akan mengakibatkan pemanasan global yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh penduduk negara industri, tetapi juga penduduk di seluruh dunia. Kenyataan ini menjadikan tema lingkungan hidup sebagai pembahasan penting ketiga dalam hubungan internasional, setelah tema keamanan internasional dan ekonomi global (Pujayanti, 2016).

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan besarnya kekayaan sumber daya alam menjadikan Indonesia amat populer di mata dunia. Seluruh kalangan masyarakat Indonesia baik itu pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Perusahaan seyogyanya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun juga harus memenehi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, karyawan, pemegang saham, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Salah satu perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan sekitar di dalam melakukan aktivitas operasionalnya adalah perusahaan manufaktur. Oleh karenanya perusahaan manufaktur seharusnya bisa memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Eriandani, 2013).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 10 perusahaan dengan limbah terbanyak pada tahun 2019. Perusahaan tersebut umumnya berasal dari sektor pertambangan logam dan mineral. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan harus memiliki konsep terintegrasi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Arti CSR secara luas merupakan kepedulian perusahaan akan lingkungan dan masyarakat sekitar. Akan

tetapi secara sempit kepedulian tersebut dapat dipahami sebagai tindakan perusahaan kepada pihak pemangku kepentingan agar tetap harmonis. Berikut disajikan data 10 perusahaan dengan limbah terbanyak di Indonesia pada tahun 2019:



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup 2020.

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu *financial*, *social*, dan *environmental* tidak hanya pada *single bottom line* (aspek *financial*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan hal ini perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), karena hanya dengan jaminan kondisi keuangan saja tidaklah cukup. Apabila sudut pandang sosial dan lingkungan diperhatikan oleh perusahaan, maka akan terjamin keberlanjutan perusahaan (*sustainability corporate*). Untuk itu perlunya CSR bersifat *mandatory* dari yang semula CSR hanya bersifat *voluntary* (Riswari, 2012).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada pada organisasi atau perusahaan yang memiliki berbagi tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti, karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu CSR sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana organisasi atau perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada

peningkatan profit semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan resiko dari dampak aktifitas produksi perusahaan (Daniri, 2008).

Perusahaan dalam melaporkan pengungkapan CSR mulai mendapat pengakuan dari masyarakat global. Regulasi dunia internasional yang berkenaan dengan pengungkapan CSR yakni GRI (*Global Reporting Initiative*) dan ISO (*International Organization for Standardization*) 26000. GRI merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan di USA pada 1997 oleh CERES dan UNEP dengan tujuan mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ekonomi global. ISO 26000 merupakan pedoman internasional mengenai tanggung jawab sosial bagi organisasi yang mulai diterbitkan pada tahun 2010, yang memberikan panduan tentang tanggung jawab sosial dan ditujukan bagi organisasi dari berbagai industri untuk membantu organisasi beroperasi dengan bertanggung jawab sosial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

Di Indonesia regulasi yang berkaitan dengan CSR terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan sehingga dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan, untuk itu menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), diantaranya adalah Listyaningsih (2018), Sari (2013), Khoirudin (2013), Kariza (2014), Chang et al. (2011), dan Edison (2017).

Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1992, mendefinisikan *Corporate governance* seperangkat peraturan yang mengatur hubungan Antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Rusdiyanto, 2019:43). *Good corporate governance* (GCG) berfungsi dalam mengatur pembagian tugas berupa hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham serta mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat. Tujuan utama GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Rusdiyanto, 2019:44).

Pelaksanaan GCG yang dijalankan dengan baik diharapkan dapat memberikan respon positif kepada masyarakat dan *stakeholders* (Heriyanto, 2015). Dijalankannya GCG dalam perusahaan dengan fungsi pengendalian internalnya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan dengan baik dan dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan para pemegang saham, sehingga mampu memberikan tekanan kepada pihak manajemen agar melaksanakan program pengungkapan CSR dengan baik.

Para pemangku kepentingan, komisaris, direksi, karyawan harus bersinergi untuk menciptakan nilai-nilai perusahaan yang selanjutnya dapat menciptakan inovasi untuk tujuan *Sustainability* (berkelanjutan). Saat ini setiap perusahaan sudah melakukan inovasi kepada masyarakat melalui program CSR yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan hal ini sangat berdampak bagi kelangsungan hidup perusahaan. *Sustainability* (berkelanjutan) membutuhkan inovasi perusahaan yang lebih lagi karena dasar keberlanjutan adalah bagaimana perusahaan bukan hanya sekedar mampu untuk menciptakan



laba (keuntungan) bagi perusahaan serta bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, namun yang terlebih penting lagi adalah bagaimana perusahaan bisa berkontribusi bagi kelestarian alam dan lingkungan (Rusdiyanto, 2019:48).

Di Indonesia peraturan tentang penerapan GCG bagi perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan bagi perseroan terbatas diatur Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Pemerintah membuat regulasi ini dengan tujuan pencapaian peningkatan kualitas perusahaan-perusahaan di Indonesia agar lebih memiliki daya saing dengan perusahaan lain di luar negeri (Ilmi, 2017).

Komposisi besaran saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah saham milik investor mengakibatkan lahirnya istilah struktur kepemilikan perusahaan. Sebuah perusahaan *go public* dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Wati, 2012).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Rusdiyanto, 2019:81). Kepemilikan manajerial akan mendorong penyatuan kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer) serta dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Crutchley & Hansen, 1989). Manajer didorong oleh pemilik saham manajerial agar berhati-hati dalam mengambil keputusan karena pemilik saham manajerial ikut merasakan secara langsung hasil dari keputusan yang diambil. Pada umumnya struktur kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer masih lebih sedikit dibandingkan oleh kepemilikan dari pihak lain.

Konflik keagenan dapat muncul ketika kepemilikan saham oleh manajerial lebih sedikit dibandingkan dengan total saham perusahaan (Rustendi dan Jimmi, 2008). Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan dalam mengambil keputusan dan aktivitas menunjukkan perilaku yang berbeda dengan manajer yang

hanya melaksanakan tugasnya sebagai manajer. Kepemilikan saham oleh manajemen akan membantu mengatasi masalah agensi apabila semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih giat dan fokus dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini berarti salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Rusdiyanto, 2019:81).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan riset ini adalah Listyaningsih (2018) dan Edison (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil penelitian dari Chang et al. (2011) dan Soliman (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya (Rusdiyanto, 2019:80). Kepemilikan institusional di Indonesia terbilang tinggi. Pemegang saham institusional di BEI hingga akhir Maret 2015 masih cukup dominan sebesar 73,14% (ekbis.sindonews.com) (Edison, 2017). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Optimalnya pengawasan didalam perusahaan merupakan efek dari adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang semakin besar berpengaruh terhadap semakin efisiennya pemanfaatan aktiva perusahaan serta mampu mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa peran penting kepemilikan institusional adalah kemampuan mengurangi permasalahan keagenan yang terjadi antar manajer dengan investor. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan baik (Wati, 2012).

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR (Listyaningsih, 2018). Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Chang et al. (2011) dan Edison (2017)

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya ada perbedaan hasil penelitian dari Bangun (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Peraturan Penanaman Modal Tahun 2007 No. 25, menjelaskan bahwa individu warga asing, entitas asing, dan/atau pemerintah asing yang berinvestasi di Indonesia, hal ini merupakan definisi dari penanam modal asing. Pada umumnya perusahaan multinasional yang berada di Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan program CSR dibanding perusahaan domestik. Perusahaan multinasional terutama perusahaan Eropa dan *United State* sangat mengedepankan isu-isu sosial dan isu lingkungan (Machmud dan Djakman, 2008) dalam Sudarno (2014). Dengan demikian apabila perusahaan memiliki kerja sama dengan kepemilikan asing, maka perusahaan tersebut akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR. Sehingga pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan multinasional diyakini lebih tinggi dibanding dengan perusahaan nasional.

Ketatnya pengawasan operasional perusahaan biasanya dimiliki oleh pihak asing. Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan pengembalian yang besar. Informasi yang lebih efisien mungkin dimiliki oleh pemilik asing agar mampu memenuhi kebutuhan internal perusahaannya. Dengan demikian para manajer terdorong untuk dapat lebih mementingkan kepentingan para investornya (Susanti, 2013). Kepemilikan asing dapat memicu perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan sosial dan diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Penanam modal asing adalah pihak yang memiliki perhatian lebih terhadap pengungkapan CSR (Sari, 2014:6).

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR (Listyaningsih, 2018). Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Chang et al. (2011) dan Edison (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Rohmah (2015) dan

Sari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Selain struktur kepemilikan perusahaan, dewan komisari dan komite audit juga menjadi indikator yang penting dalam mempengaruhi pengungkapan CSR. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Rusdiyanto, 2019:81). *Accountability* perusahaan bisa tercapai apabila dewan komisaris memberikan dorongan kepada kelompok manajemen agar memberikan informasi CSR secara luas. Sesuai dengan pendapat Ghozali & Chariri (2014) yang menyatakan bahwa berpedoman *stakeholders theory*, komisaris berfungsi sebagai *accountability system* yang memiliki kapasitas memberikan kepercayaan bahwa perusahaan juga harus memenuhi keinginan *stakeholders*.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam system pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Rusdiyanto, 2019:81). Komite audit diharapkan mampu berperan positif dalam pengungkapan CSR. Tujuan CSR *disclosure* yang utama adalah agar kinerja keuangan semakin baik dan juga agar *stakeholders* semakin yakin dan percaya pada manajemen, serta problem etika pihak manajemen dapat berubah lebih baik (Ghozali & Chariri, 2014).

Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Khoirudin, 2013), hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Nurman dan Miranti (2013) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Listyaningsih (2018), Sari (2013), dan Rohmah (2015) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kemudian penelitian

Susanti (2013) menemukan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Listyaningsih (2018) dan Priantana dan Yustian (2011) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya (Fahmi, 2017:2).

Dalam suatu organisasi fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pemimpin tersebut telah memiliki *experience* (pengalaman) dan *science* (ilmu pengetahuan) yang maksimal. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja. Karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan (Fahmi, 2017:12).

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2017:22). Sehingga dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Seperti keinginan perusahaan untuk melakukan *right issue*, yang artinya *right issue* tersebut diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membelinya. Sehingga berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan oleh manajemen perusahaan pihak investor akan bisa menganalisis bagaimana kondisi perusahaan

serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari kemampuan *profitabilitas* yang akan dihasilkan (Fahmi, 2017:26).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan rasio-rasio yang bersumber dari data laporan keuangan perusahaan atau disebut dengan rasio keuangan. Maka dari itu pembahasan mengenai kinerja keuangan perusahaan tidak lepas kaitannya dengan rasio keuangan. Rasio profitabilitas menjadi salah satu instrumen analisis keuangan yang kerap kali digunakan oleh investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan profit. Besarnya nilai profitabilitas dapat dihitung menggunakan analisis *Return on Assets (ROA)*. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit yang diperoleh dari kepemilikan aktiva, merupakan fungsi dari analisis ROA. Semakin baik kinerja keuangan, memungkinkan perusahaan melakukan CSR *disclosure* dengan baik.

Salah satu rujukan pengukuran keberadaan dan keberlangsungan hidup perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan menjadi pedoman bagi investor untuk menentukan investasi (penanaman modal) dengan membeli saham perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan menjadi sebuah keharusan agar saham perusahaan tetap diminati oleh investor. Ketika investor menilai kinerja keuangan perusahaan baik maka dapat dimungkinkan perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR dengan baik pula (Ilmi, 2017).

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan adalah Pangaribuan (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan komisaris, dan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, akan tetapi komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Nilayanti dan Suaryana (2019) menghasilkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Petta (2017) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal, Struktur

modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Prahesti dan Abundanti (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Sarafina dan Saifi (2017) menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan variabel dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan, kemudian secara parsial masing-masing variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Peneliti terdahulu yang pernah meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap CSR adalah Nurman dan Miranti (2013) dan Othman et al (2009) menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Kariza (2014) bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Hubungan antara struktur kepemilikan, GCG, kinerja keuangan dan CSR menarik untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam. Hasil penelitian terdahulu yang saling berlawanan menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh struktur kepemilikan, GCG, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR, dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Dengan adanya tambahan variabel intervening kinerja keuangan perusahaan merupakan pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh langsung GCG dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR, sementara penelitian ini menggabungkan variabel yang diteliti ke dalam sebuah analisis jalur (*path analysis*). Menguji pengaruh langsung GCG dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR, serta juga menguji pengaruh tidak langsung antara struktur kepemilikan dan GCG terhadap pengungkapan CSR melalui kinerja keuangan perusahaan.

Roziq dan Danurwenda (2012) meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja

keuangan, GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap risiko bisnis, kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap CSR, risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap CSR. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa GCG memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan, dimana nantinya kinerja keuangan dapat memaksimalkan program pengungkapan CSR. Berdasarkan adanya keterkaitan GCG dengan kinerja keuangan, maka dalam penelitian ini kinerja keuangan sebagai variabel *intervening* yang mampu memediasi hubungan antara struktur kepemilikan dan GCG dengan CSR. Artinya kinerja keuangan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan GCG, serta kinerja keuangan mempengaruhi CSR.

Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017 – 2019 merupakan objek pada penelitian ini, dikarenakan jumlah industri manufaktur termasuk terbesar yang ada di Indonesia, sehingga memberikan dampak kegiatan yang sangat besar pula terhadap perkembangan perekonomian seperti dalam hal kesempatan kerja bagi masyarakat dan penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan nasional. Efek negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan adanya pertumbuhan industri manufaktur yaitu semakin meningkatnya jumlah limbah industri yang mampu menimbulkan pencemaran sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Sedangkan pemilihan tahun 2017 – 2019 dikarenakan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada panduan GRI-G4 tahun 2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?



6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
7. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
8. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
9. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
10. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
11. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan
4. Menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan
5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
6. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR
7. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR
8. Menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR
9. Menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR
10. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR
11. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, maupun memberikan kontribusi , kepada pihak yang terkait antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai rujukan penelitian berikutnya yang berkaitan tentang *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan *corporate social responsibility*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai acuan penilaian perusahaan khususnya yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris dan komite audit, dan kinerja keuangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### b. Bagi Investor

Dimanfaatkan sebagai petunjuk bagi investor dan calon investor untuk menentukan pilihan perusahaan yang memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap *stakeholder* yang dibuktikan dengan pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## BAB 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Agensi

Perkembangan sebuah perusahaan dapat menyebabkan adanya batas antara manajemen dengan pemilik perusahaan dimana batasan itu tidak bisa dihindari. Adanya batasan antara manajemen dan pemilik tersebut akan munculah permasalahan agensi dimana masing-masing pihak akan memaksimalkan fungsinya. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang kontrak antara satu atau lebih pihak prinsipel dan agen, dimana prinsipel memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak agen. Dimana antara pihak dalam hubungan keagenan mempunyai tanggung jawab yang harus diterima maupun dijalankan.

Menurut Monk dan Minow (1995), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Prinsipal adalah pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal, sedangkan pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen. Kedua pihak tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang mereka miliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal yang telah mereka tempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi/proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan keagenan (Rusdiyanto, 2019).

Kerjasama manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) merupakan hubungan keagenan yang dijelaskan menurut teori keagenan. Biaya keagenan (*agency cost*) muncul akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal (Hamdani, 2016:30). Pendapat teori ini menekankan bahwa pembatas antara pemilik dengan manajemen perusahaan mampu memunculkan problem keagenan (*agency problem*). Kewenangan pengelola (manajer) yang diberikan

oleh pemilik perusahaan digunakan untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam *agency theory* manajer didorong agar mampu mengoptimalkan tingkat profit yang berasal dari modal pemegang saham dan karena besarnya kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (Hamdani, 2016:30).

Peran pembentukan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai jembatan penghubung antar investor dan manajemen dalam hal menjalankan hak dan kewajiban dalam lingkungan perusahaan, hal ini terdapat hubungan dengan konsep *agency theory*. Teori agensi memberikan warna baru terhadap pelaksanaan GCG dimana antara pihak principal dengan pihak agen dapat melakukan kesepakatan kerja yang sifatnya proporsional (Raharjo, 2013).

Kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis perusahaan yaitu adanya penerapan *good corporate governance* yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi yang lengkap antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders*. Hubungan *agency theory* dengan proses pembentukan sistem tata kelola perusahaan yaitu adanya pembatas mengenai kepentingan investor dengan kepentingan manajemen. Manajemen berusaha untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kecurangan, sehingga diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini didasari adanya tingkat kepercayaan investor terhadap pihak manajemen didalam mengelola dana dari investor.

## 2.2 Teori Legitimasi

Fokus dari teori *legitimacy theory* adalah situasi hubungan antara pihak perusahaan dan lingkungan publik. Komponen pokok bagi perusahaan agar tetap terus bertahan dan berkembang dalam situasi saat ini adalah diperlukannya suatu pengesahan/legitimasi dari lingkungan masyarakat. Kaitan model yang diperlukan dalam strategi perusahaan terutama dalam saat ini, dimana situasi lingkungan publik yang selalu mengalami perkembangan, untuk itu diharapkan perusahaan

berada pada posisi yang tepat (Hadi, 2011:87). Keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan akan mendatangkan manfaat maupun sumber daya potensial bagi perusahaan, hal ini tercipta apabila adanya legitimasi dari masyarakat.

Salah satu teori yang dipakai untuk menerangkan tentang kebijakan mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan adalah *legitimacy theory*. *legitimacy theory* ini mengemukakan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasional sesuai dengan margin nilai sosial dan terdapat kontrak sosial yang berimplisit antara organisasi dan masyarakat. Perlunya masyarakat diyakinkan oleh pihak perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya dalam batas-batas norma yang ada pada lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014:441). Oleh karena itu nilai positif dari masyarakat sangat diharapkan perseroan sehubungan dengan aktivitas yang dijalankan.

Perusahaan agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat memerlukan sebuah penerapan kerja yang berdasarkan lingkungan, hal tersebut disebabkan pengaruh masyarakat yang besar sehingga mampu menentukan kebutuhan akan finansial dan juga sumber-sumber ekonomi lain (Gray et.al, 1995). *Legitimacy theory* bisa juga diartikan sebagai strategi perseroan dalam mengelola usahanya dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Maka dari itu pihak-pihak yang sangat peduli terhadap upaya kemajuan perseroan sangat diharapkan oleh perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan dijelaskan dalam laporan tahunan, hal ini memberikan kesan adanya pengakuan positif dari publik, sehingga mampu berefek terhadap meningkatnya nilai perusahaan, dan akhirnya terjadilah peningkatan profit perusahaan. Investor ketika melihat kondisi tersebut pada akhirnya akan menentukan pilihan untuk menanam saham di perusahaan tersebut. Apabila implementasi mengenai tanggungjawab social perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai norma-norma sosial yang ada, maka tercapainya harapan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan dapat terus bertahan hidup dalam menjalankan bisnisnya apabila perusahaan mempunyai usaha untuk selalu menyelaraskan diri dengan nilai dan norma di dalam masyarakat serta dapat

mengantisipasi terjadinya *legitimacy gap*. Hal ini dianggap sah sesuai pandangan masyarakat.

*Legitimacy theory* dalam penggunaannya memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan manufaktur dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan mendapat legitimasi dari lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini berarti apabila bank mendapatkan legitimasi dari nasabah atau masyarakat sekitar, maka perusahaan dapat tetap bertahan dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat sekitar serta mendapatkan profit dimasa mendatang. Memperoleh kepercayaan dari lingkungan masyarakat sekitar dan mampu meningkatkan nilai profit perusahaan merupakan efek positif dari perusahaan yang melakukan laporan pengungkapan CSR dengan baik.

### 2.3 Teori Stakeholders

Kecenderungan perseroan dalam menjalankan bisnisnya terkadang lebih memperhatikan kebutuhan sebagian dari *stakeholders* akibatnya kebutuhan *stakeholders* lainnya diabaikan. Friedman 1970 dalam Ghazali dan Chairi (2007), dalam artikel *New York Times Magazine* menuliskan bahwa perseroan-perseroan semata-mata berfikir mengenai strategi mendapatkan laba semata sedangkan hal-hal yang berhubungan tentang kemakmuran masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Munculnya statemen tersebut maka lahirlah konsep yang dengan istilah *stakeholder theory* dengan harapan dapat mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi *stakeholdersnya*.

Ghazali & Chariri (2014) menyatakan bahwa keberpihakan perusahaan terhadap *stakeholders* harus tetap terjalin dengan baik, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada *stakeholders*. Media komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* suatu perusahaan adalah adanya pelaporan mengenai pengungkapan CSR. Maka dari itu perlunya perusahaan memiliki komunikasi baik dengan *stakeholders* sehingga akan terjalin hubungan baik antar perusahaan dengan *stakeholders*. Manajemen perusahaan dalam merencanakan sebuah laporan harus sesuai dengan kemauan dan kekuatan dari pihak *stakeholders*, hal ini

merupakan cerminan dari *stakeholders theory*. Perusahaan dalam hal kemampuan mengelola sumber daya terbatas dan kemampuan dalam mengatur pengelolaan produk yang dihasilkan serta saluran terhadap media, dalam hal ini merupakan wujud dari kekuatan (Ghozali & Chariri, 2014).

*Stakeholders* dalam hal ini adalah semua pihak yang bisa menjadi pengaruh dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik itu pihak dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Suatu hal yang menjadi prioritas utama pihak manajemen adalah terpenuhinya kebutuhan dari *stakeholder*. Karena mereka yaitu *stakeholder* memiliki peran terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen. Keinginan pihak *stakeholder* salah satunya adalah adanya pelaporan mengenai pengungkapan CSR, apabila hal ini dilaksanakan oleh pihak manajemen maka akan terjalin sebuah hubungan yang harmonis antara perusahaan dalam hal ini pihak manajemen dengan *stakeholder*, maka masyarakat akan percaya kepada pihak pengelola perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014).

#### **2.4 Pengungkapan (*Disclosure*)**

Perusahaan dalam melakukan pengungkapan (*disclosure*) atau pelaporan pada umumnya merupakan sebuah penyampaian informasi atau bentuk pertanggungjawaban tentang aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan bagi pihak diluar manajemen dianggap sebagai jendela informasi yang memungkinkan mereka dapat melihat kondisi di suatu perusahaan (Busyra, 2016:46). Tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan menggambarkan luasnya informasi yang dapat diperoleh oleh pihak diluar manajemen perusahaan serta dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, serta tingkat pendidikan dan budaya.

Pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan laporan keuangan harus mampu memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha apabila dikaitkan dengan laporan keuangan. Informasi tersebut diungkapkan secara jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan segala aktivitas ekonomi yang

akan berpengaruh terhadap hasil operasi bagi semua unit usaha di dalam suatu perusahaan. Media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan adalah laporan tahunan perusahaan. Di Indonesia peraturan tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dikeluarkan oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002, Surat Edaran Nomor: SE-03/BL/2011 dan Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008.

Menurut Raditya (2012), terdapat tiga konsep pengungkapan, diantaranya adalah: (1). Pengungkapan cukup (*Adequate Disclosure*), yaitu pengungkapan minimum yang harus dipenuhi sebuah laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan secara keseluruhan tidak menyesatkan. (2). Pengungkapan wajar (*Fair Disclosure*), yaitu pengungkapan yang harus dicapai agar informasi yang sama dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan. (3). Pengungkapan penuh (*Full Disclosure*), yaitu bahwa pengungkapan ini menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan melalui pengambilan keputusan.

Konsep pengungkapan dan jenis pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang baik diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan *stakeholders* dalam menentukan perusahaan yang mampu mengelola dananya dengan harapan akan memberikan *return* dan nilai jangka panjang optimal. Akuntabilitas diperlukan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta bersifat transparan. Informasi terkait keuangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus diungkapkan secara memadai, selain pengungkapan minimum yang diwajibkan agar dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan laporan pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

## **2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Bentuk tanggung jawab perusahaan mengenai masalah sosial dan lingkungan yang terjadi sebab adanya kegiatan operasional perusahaan adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meningkatnya nilai perusahaan termasuk peran dari CSR. Menurut *The World Business Council for*



*Sustainable Development* (WBCSD), definisi “CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, beserta komunitas-komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan” (Astuti, 2015). Sedangkan Agoes (2014:32) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) dan diluar perusahaan (eksternal) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungannya.

Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, bahwa “Tanggung jawab sosial atau CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Menurut GRI (*Global Reporting Initiative*) “CSR merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan disebut juga laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang diartikan juga sebagai praktek dalam mengukur, mengungkapkan, dan menjadi bertanggung jawab kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal untuk kinerja organisasi yang mengarah pada perkembangan yang berkelanjutan untuk menggambarkan pelaporan ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial”.

Menurut Rahmawati (2015:183) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun 2007, yakni:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatiannya kepada praktik pengungkapan CSR perusahaan. Harapan dari pemerintah bahwa setiap unit usaha atau pelaku ekonomi yang bergerak pada bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain mereka berupaya untuk kepentingan para investor dan hanya fokus pada pencapaian laba, mereka juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Praktik pengungkapan CSR juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2012) paragraf 15, menyatakan bahwa “Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Menurut Busyra (2016:46) menyatakan bahwa ada tiga dimensi dari komponen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu sebagai berikut:

1. *Corporate philanthropy* adalah kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan, di mana kegiatan amal dilakukan diluar kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar

perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.

2. *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tujuan perusahaan. Dalam hal ini ketika perusahaan sedang meningkatkan profitabilitas.
3. *Corporate policy* adalah erat kaitanya dengan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Dalam hal ini karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh terhadap perusahaan maupun masyarakat secara luas.

Sedangkan John Eklington (1997) dalam Busyra (2016:44) yang terkenal dengan istilah “*The Triple Bottom Line*”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu:

Tabel 1.1 *The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility*

	<i>People</i>	<i>Profit</i>	<i>Planet</i>
<b>Definisi</b>	Sebuah bisnis harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya.	Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya.	Perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya alam dengan sangat bertanggung jawab dan menjaga keadaan lingkungan serta memperkecil jumlah limbah produksi.
<b>Jenis Kegiatan</b>	Kegiatan kedermawanan yang dilakukan secara tulus untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia.	Tindakan perusahaan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi.	Penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung jawab.
<b>Contoh</b>	Beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan	Pembinaan UKM dan bantuan modal kredit	Penanaman pohon dan kampanye lingkungan hidup

Sumber: Busyra (2016)

Menurut Hadi (2016) menyatakan bahwa praktek pelaksanaan CSR dapat dibagi kedalam tiga bagian, diantaranya:

1. *Social Obligation*

Pelaksanaannya CSR hanya mengikuti persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah karena hanya dianggap sebagai salah satu bentuk kewajiban semata. Adanya keterpaksaan bagi perusahaan dalam menjalankan program CSR.

2. *Social Reaction*

Pada tahap ini perusahaan sudah menjalankan CSR dengan lebih maju karena sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa CSR itu penting. Namun karena berbagai alasan pelaksanaan CSR masih jauh dari yang diharapkan meskipun sudah diatas sekedar memenuhi persyaratan minimal. Dalam konteks ini, perusahaan masih membutuhkan dorongan-dorongan eksternal agar pelaksanaan CSR lebih maju.

3. *Social Response*

Dalam konteks ini, kegiatan CSR mengalami perubahan paradigma. Sebelumnya lebih pada pendekatan *ad hoc*, *charity*, serta *externally driven* maka sekarang lebih *internally driven* dengan menekankan pentingnya *partnership*. Didalam tahap ini perusahaan dan elemen masyarakat mampu secara berdampingan mencari peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan masyarakat..

Panduan terhadap penyusunan laporan keberlanjutan umumnya mengacu pada *Global Reporting Initiative (GRI)* yaitu salah satu organisasi internasional yang aktivitas utamanya difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman pengungkapan *sustainability report*. GRI mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Darwin, 2004).

Berdasarkan GRI tahun 2016, mengenai indicator pelaporan standar dalam *sustainability report* terdiri dari:

1. Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*), yaitu menyangkut adanya pengaruh organisasi terhadap kondisi perekonomian para pemangku kepentingan di tingkat sistem ekonomi lokal, nasional, dan global.
2. Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*). Yaitu menyangkut seberapa besar dampak adanya perusahaan tersebut terhadap alam, baik yang hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air, dan udara.
3. Kinerja Sosial (*social performance indicator*), terdiri dari:
  - a. Tenaga Kerja (*labor practices and decent work*)
  - b. Hak Asasi Manusia (*human rights performance*)
  - c. Sosial (*Society*)
  - d. Tanggung jawab Produk (*product responsibility performance*)

GRI Standar mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada GRI Standar memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan berkelanjutan. GRI Standar modular yang saling terkait ini dirancang terutama untuk digunakan sebagai satu set dokumen guna menyiapkan laporan keberlanjutan yang berfokus pada topik material. Ketiga Standar universal tersebut digunakan oleh setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan. Setiap organisasi itu juga memilih dari standar topik spesifik untuk melaporkan topik materialnya-ekonomi, lingkungan atau sosial. Menyiapkan laporan sesuai dengan GRI Standar memberikan gambaran inklusif tentang topik material organisasi, dampak terkaitnya, dan bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Organisasi juga dapat menggunakan semua atau sebagian dari GRI Standar untuk melaporkan informasi spesifik.

## **2.6 Good Corporate Governance (GCG)**

Istilah *Corporate governance*, pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1992, mendefinisikan *Corporate governance* seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka (Rusdiyanto, 2019). Tujuan utama GCG adalah untuk menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Rusdiyanto, 2019). Terciptanya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional menjadikan perusahaan semakin baik, maka dari itu perlunya yang namanya penerapan GCG dalam lingkungan perusahaan. Heriyanto (2015) menerjemahkan GCG adalah sebuah mekanisme yang mampu memberikan keyakinan kepada pihak investor terhadap perusahaan selaku pengelola. Dengan harapan investor mendapatkan profit dari dana yang telah diinvestasikan.

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Uraian Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Kejaksanaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya adalah pihak yang berkepentingan”.

### **2.6.1 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Hisamuddin dan Tirta, (2012:95) Merujuk pada pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia, bahwa prinsip GCG yaitu :

#### **1. Transparansi (*transparency*)**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan, termasuk dalam prinsip transparansi

#### **2. Akuntabilitas (*accountability*)**

Prinsip akuntabilitas digunakan dalam mengatasi permasalahan agensi yang lahir dari pemegang saham dengan dewan direksi, dan pengendaliannya oleh komisaris.

### 3. Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip *responsibility* memiliki maksud bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap regulasi-regulasi yang berlaku.

### 4. Independensi (*independency*)

Prinsip independensi artinya setiap bagian yang ada dalam perusahaan harus bersifat independen yaitu tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun.

### 5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Penekanan prinsip kewajaran adalah bahwa di dalam perusahaan setiap bagian-bagian memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai aturan yang berlaku, hal ini tampak adanya jaminan hak-hak yang sama antara pemegang saham minoritas maupun mayoritas.

## 2.6.2 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Manfaat GCG merujuk dari *For Corporate Governance in Indonesia* (2003), adalah:

1. Kinerja perusahaan semakin meningkat dengan adanya pengambilan keputusan melalui proses yang lebih baik,
2. Efisiensi kinerja meningkat dan pelayanan kepada pemangku kepentingan lebih baik,
3. Investor akan lebih percaya terhadap perusahaan,
4. Memudahkan perolehan dana pembiayaan yang lebih ringan,
5. Pemegang saham semakin senang dengan pengelola perusahaan karena mampu meningkatkan deviden bagi pemegang saham.

Penerapan GCG berguna pada perusahaan yang tercatat di BEI. Pihak manajemen perusahaan, para *stakeholders*, hingga lapisan masyarakat merasakan manfaat dari penerapan *good corporate governance*.

## 2.6.3 Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki sejumlah saham di perusahaan. Cara mengukurnya tampak pada jumlah proporsi saham yang dimiliki manajemen yang tampak dalam bentuk prosentase (Bernandhi 2013). Berdasarkan teori, Jensen dan

Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan memunculkan konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan manajemen. Konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan manajemen akan terus meningkat seiring keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi.

Kepemilikan manajemen yang terdapat dalam perusahaan akan memunculkan dugaan bahwa nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari kepemilikan manajemen yang meningkat dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan berpotensi mampu mengurangi alokasi sumber daya yang tidak menguntungkan (Efendi, 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku oportunistik manajer yang ikut mengalami peningkatan. Terdapatnya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka cenderung dapat menyelaraskan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan principal diramalkan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Istilah Hubungan non-monotonik adalah hubungan struktur kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Hubungan tersebut timbul akibat adanya insentif yang dimiliki manajer dan mereka cenderung berusaha untuk melakukan penyeimbangan kepentingan dengan pemilik saham luar (*outside owners*) dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan yang berasal dari investasi mengalami peningkatan. Semakin efektifnya manajemen dalam memonitor setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan apabila porsi saham yang dimiliki pihak manajemen besar (Permanasari, 2010). Disamping itu, Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa manajemen juga akan semakin giat di dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, sehingga masalah keagenan dapat diramalkan akan berkurang dan kinerja perusahaan menjadi semakin meningkat.



#### 2.6.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat dideskripsikan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau organisasi (Bernandhi, 2013). Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya (Rusdiyanto, 2019). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa peran penting kepemilikan institusional adalah kemampuan mengurangi permasalahan keagenan yang terjadi antar manajer dengan investor.

Keunggulan kepemilikan institusional menurut Permanasari (2010) adalah: (1). Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, (2). memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Pentingnya kepemilikan institusional dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjaga kemakmuran para investor, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas menekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam *capital market* (Bernandhi, 2013).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Besarnya kepemilikan saham oleh institusi maka mampu mengoptimalkan kekuatan suara dan dorongan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pengawasan oleh institusi dapat memaksimalkan kerja manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Monitoring yang

dilakukan pihak institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. Kenaikan nilai perusahaan menandakan peningkatan kemakmuran para pemegang sahamnya (Permanasari, 2010).

#### **2.6.5 Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh penanam saham asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 bahwa deskripsi kepemilikan asing adalah penanam modal di Indonesia yang berasal dari warga asing, organisasi asing, dan pemerintah asing (Sissandhy, 2014). Menurut Rahayu (2015), bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah kepemilikan asing. Sedangkan menurut Etha (2010), arti dari kepemilikan asing adalah saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah yang berkedudukan di luar negeri.

Ketatnya pengawasan operasional perusahaan biasanya dimiliki oleh pihak asing. Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan pengembalian yang besar. Informasi yang lebih efisien mungkin dimiliki oleh pemilik asing agar mampu memenuhi kebutuhan internal perusahaannya. Dengan demikian para manajer terdorong untuk dapat lebih mementingkan kepentingan para investornya (Susanti, 2013).

#### **2.6.6 Dewan Komisaris**

Perseroan dalam setiap menjalankan kegiatan usaha bisnisnya memiliki anggota dewan komisaris yang mana dewan ini bertugas sebagai alat control perusahaan. Dewan komisaris bertugas sebagai pengawas jalannya kegiatan perusahaan merupakan bentuk suatu bentuk dari konsep *agency theory*. Perusahaan dalam menjalankan usaha bisnisnya dibantu oleh dewan komisaris, yang mana dewan komisaris ini bertugas sebagai pengendali internal tertinggi dan juga memiliki tanggung jawab sebagai pengawas serta diharapkan mampu memberikan opini-opini kepada dewan direksi, serta tak kalah penting bahwa

tugas dewan komisaris mampu mengontrol perusahaan dalam melaksanakan system GCG sesuai regulasi yang telah ditetapkan (Heriyanto, 2015). UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, menjelaskan mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil direksi dalam menjalankan usaha bisnisnya akan meminta saran kepada dewan komisaris. Dewan komisaris dapat melakukan penyelidikan atas penyimpangan yang dilakukan oleh dewan direksi dengan melihat hasil laporan rutin yang dibuat oleh dewan direksi. Dari laporan tersebut dewan komisaris melihat apakah dewan direksi dalam menjalankan usaha bisnisnya sesuai aturan-aturan yang telah berlaku dalam perusahaan atau belum.

Menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 5, menyatakan bahwa “Minimal dua anggota dewan komisaris yang wajib dimiliki perusahaan yang berbentuk PT”. Di negara Indonesia jumlah anggota dewan komisaris antar perusahaan satu dengan yang lain berbeda-beda disesuaikan dengan besar dan kompleknya perusahaan. Dewan komisaris diharapkan mampu sebagai alat monitoring mengenai kebijakan dewan direksi, tingkah laku manajemen, memberikan arahan mengenai strategi yang dijalankan perusahaan, serta mampu mengarahkan manajer memaksimalkan kinerja perusahaan agar tercapai visi dan misi perusahaan. Dampak pelaksanaan supervisi oleh anggota dewan komisaris berefek pada meningkatnya tanggung jawab pihak manajemen terhadap kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan.

#### **2.6.7 Komite Audit**

Menurut Undang-Undang No.19 tahun 2003 pasal 70 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa komisaris BUMN wajib membentuk komite audit yang bertugas untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal. Semakin besar komite audit akan lebih baik bagi perusahaan. Akibatnya, menunjukkan pengawasan yang lebih maksimal untuk mendorong pelaksanaan GCG yang salah satunya tranparansi agar efektif sehingga mencegah perilaku oportunistik dan profitabilitas meningkat. Perhitungan komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah komite audit perusahaan tersebut. Sebuah aturan yang mengharuskan komisaris independen dijadikan sebagai ketua komite audit, hal ini merujuk pada

SK. Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004,. Anggota komite audit berjumlah satu atau lebih anggota dewan komisaris. Tiga faktor kunci penentu efektivitas komite audit meliputi frekuensi pertemuan, keahlian di bidang keuangan, dan komitmen waktu (Arifani, 2013). Ketiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh komite audit tersebut mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi proses pelaporan keuangan di suatu perusahaan.

Tanggung jawab komite audit pada umumnya ada tiga. Tanggung jawab tersebut meliputi (Ratnasari, 2011):

1. Laporan keuangan

Komite audit bertanggung jawab memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Tata kelola perusahaan

Komite audit bertanggung jawab memberikan kepastian bahwa perusahaan benar-benar menjalankan usaha bisnisnya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

3. Pengawasan perusahaan

Pengawasan system pengendalian internal, merupakan tanggung jawab komite audit terhadap pengawasan perusahaan.

Bersikap dan bertindak independen harus dilakukan oleh komite audit. Independensi komite audit adalah tolak ukur moralitas dan merupakan dasar integritasnya sebagai komite audit. Dewan komisaris dibantu oleh komite audit dengan cara menyampaikan ide atau pendapat kepada dewan komisaris dengan tujuan agar kinerja perusahaan semakin meningkat. Sebab dibutuhkan kontribusi dari komite audit karena kurangnya tingkat monitoring dewan komisaris terhadap jalannya kinerja perusahaan.

## 2.7 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan secara berkala mengenai ketercapaian kegiatan operasional suatu organisasi dan karyawannya berlandaskan standar, sasaran, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Pemilihan instrument yang

tepat oleh pihak manajemen akan mampu memberikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka dari itu akan efektifitas suatu organisasi dapat terwujud. Sedangkan maksud dari efisien adalah proporsi antara input dengan output, dalam hal ini kondisi yang menghasilkan output yang tinggi yang diharapkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Mulyadi, 2015:2).

Menurut Agustin et.al (2013). Analisis rasio keuangan menggunakan teknik perbandingan, yaitu:

1. *Cross-sectional approach*

Metode ini menggunakan perbandingan rasio keuangan antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tetapi sejenis dan dalam waktu yang sama.

2. *Analisis time series*

Metode ini menggunakan perbandingan rasio keuangan dari periode satu dengan periode yang lain dalam satu perusahaan.

Dari uraian mengenai teknik analisis rasio keuangan maka perusahaan akan menentukan satu pilihan diantara kedua teknik tersebut. Dalam menentukan pilihan suatu perusahaan akan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Dengan analisis rasio tersebut perusahaan akan mengetahui apakah mengalami progress atau malah sebaliknya. Selain itu analisis rasio keuangan bisa dimanfaatkan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan.

Perusahaan disaat mengalami peningkatan profit yang signifikan, condong akan melakukan kegiatan CSR yang lebih sempurna dengan memberikan informasi CSR tersebut ke dalam *annual report*. Kasmir (2012), mengungkapkan terdapatnya interaksi antara CSR dengan profitabilitas, hal tersebut memberikan konsep bahwa perilaku sosial masyarakat berpengaruh terhadap gaya leadership dari pengelola perusahaan. Dalam hal ini diharapkan mampu berefek terhadap kinerja perusahaan dan akhirnya mampu profit yang lebih tinggi. Fungsi dari profitabilitas adalah tindakan independen dari pengelola perusahaan dalam rangka menyampaikan informasi ke pemegang saham mengenai CSR *disclausure*. Tingkat profitabilitas meningkat signifikan, memberikan asa terciptanya stimulus pengelola perusahaan dalam menyampaikan informasi berkenaan CSR

*disclosure*. Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat), yaitu: (Fahmi, 2017:69).

#### 1. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka GPM akan meningkat dan begitu pula sebaliknya, apabila harga pokok penjualan menurun maka GPM akan menurun.

Cara menghitungnya adalah:

Rumus :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Keterangan :

*Cost of Good Sold* : Harga pokok penjualan

*Sales* : Penjualan

#### 2. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. Cara menghitungnya adalah:

Rumus :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{sales}}$$

Keterangan :

*Earning After Tax (EAT)* : Laba setelah pajak

#### 3. *Return on Investmen* (ROI)

*Return on Investmen* (ROI) atau *Return on Asset* (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengambilan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

Rumus :

$$\text{Return On Investmen} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

#### 4. Return On Equity (ROE)

ROE disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset. Rasio ini menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Cara menghitungnya adalah:

Rumus :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}}$$

Keterangan :

*Shareholders' Equity* : Modal sendiri

### 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar gambaran bagi peneliti saat ini, walaupun terdapat perbedaan subjek, objek, variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
1.	Listyaningsih (2018)	<i>The Effect of Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index</i>	Variabel Dependen: CSR Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, institusional, asing, dewan komisaris independen, komite audit Model: Regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
2.	Edison	Struktur	Variabel	Hasil penelitian

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
	(2017)	Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Dependen: CSR Variabel Independen: Kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial Model: Regresi linier berganda	menunjukkan bahwa secara parsial, struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR
3.	Chang et al. (2011)	The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea	Variabel Dependen: CSR Variabel Independen: Ownership Structure Model: Analisis regresi	Kepemilikan institusional, kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR.
4.	Sari (2013)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan CSR di dalam Sustainability Report pada Perusahaan	Variabel Dependen: CSR Variabel Independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris, ROE, ROI Model: Analisis regresi berganda	Variabel kepemilikan institusional, ROE dan ROI memberi pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di dalam sustainability report. Sedangkan variabel dewan komisaris tidak memberi pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di dalam sustainability report.



No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
		Manufaktur yang Terdaftar di BEI		
5.	Khoirudin (2013)	Pengaruh Elemen <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel. dependen: CSR Variabel independen: GCG (ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah) Model: Regresi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR.
6.	Nurman dan Miranti (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat. Pengungkapan CSR Pada Perusahaan yang <i>listing</i> dalam <i>Indonesia Sharia Stock Index</i> (ISSI)	Variabel dependen : CSR Variabel independen: Kepemilikan saham publik, tipe perusahaan, <i>corporate value</i> , <i>financial performance</i> , dan dewan komisaris, serta status perusahaan. Model: <i>Multiple linear regression</i>	Tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan status perusahaan berpengaruh terhadap CSR, Sedangkan Porsi kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh terhadap CSR.

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
7.	Kariza (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan yang <i>Listing</i> di Bursa Efek Indonesia	Variabel dependen: CSR Variabel independen: profitabilitas, kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan likuiditas serta <i>leverage</i> Model: Regresi linier berganda	Likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada BEI, <i>Corporate value. financial performance</i> , dan kinerja lingkungan, serta <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap CSR.
8	Wiranata dan Nugrahanti (2013)	Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia	Variabel dependen: profitabilitas (ROA) Variabel independen: kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga Model: Regresi linier berganda	Kepemilikan asing dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas.
9	Rohmah (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate</i>	Variabel Dependen: CSR Variabel Independen: Dewan komisaris	Dewan komisaris independen dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR,

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
		<i>Social Responsibility</i> Di Dalam Laporan <i>Sustainability</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)	independen, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan Model: Analisis regresi berganda	sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR.
10	Hermiyetti dan Katlanis (2017)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Variabel independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit Model: Regresi linier berganda	Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
11	Petta (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel	Variabel Dependen: Kinerja keuangan Variabel Independen: Kepemilikan institusional Variabel Intervening: Struktur modal	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal, Struktur modal tidak

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
		Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia ( BEI )	Model: Analisis <i>Path</i>	berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kemudian struktur modal mampu memediasi kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
12	Sudarno (2014)	Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening	Variabel Dependen: Nilai perusahaan Variabel Independen: Kepemilikan asing Variabel Intervening: CSR Model: Analisis regresi berganda	Kepemilikan asing berpengaruh terhadap CSR, Kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
13	Nilayanti dan Suaryana (2019)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen: kinerja keuangan Variabel Independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Variabel pemoderasi: kebijakan deviden Model: moderated regression analysis (MRA)	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kebijakan deviden mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan dan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
				manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.
14	Sarafina dan Saifi (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan	Variabel Dependen: kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Variabel Independen: dewan komisaris independen dan komite audit Model: Analisis regresi berganda	Menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan variabel dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan, kemudian secara parsial masing-masing variabel <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
15	Prahesti dan Abundanti (2015)	Pengaruh Risiko Kredit, Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen: kinerja keuangan Variabel Independen: Non Performing Loan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen Model: Analisis regresi linear berganda	Risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan dewan komisaris independen berpengaruh positif

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
				namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
16	Pangaribuan (2017)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Pengelolaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016	Variabel Dependen: kinerja keuangan Variabel Independen: kepemilikan majerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit Model: Analisis regresi linear berganda	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan komisaris, dan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, akan tetapi komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan.
17	Othman et al. (2009)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi CSR pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia	Variabel dependen: CSR Variabel independen: <i>corporate value</i> , kinerja keuangan, dewan direksi muslim dan tipe perusahaan Model: <i>Multiple linear regression</i>	Ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
18	Roziq dan Danurwenda (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Corporate</i>	Variabel dependen: CSR dan resiko bisnis, Variabel independen: GCG,	GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan, GCG berpengaruh terhadap resiko bisnis, kinerja keuangan tidak

No	Peneliti	Judul	Desain Penelitian	Hasil
		<i>Social Responsibility</i> Melalui Risiko Bisnis Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel intervening: kinerja keuangan Model: Analisis jalur	berpengaruh terhadap CSR, resiko bisnis tidak berpengaruh terhadap CSR, GCG berpengaruh terhadap CSR.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda, ini terlihat dari penelitian terdahulu mengenai CSR. Penelitian ini pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu dan merupakan penelitian replika. Terdapat variabel intervening kinerja keuangan merupakan pembeda dalam penelitian ini. Variabel penelitian terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran dewan komisaris, serta adanya variable komite audit yang diperkirakan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR melalui kinerja keuangan. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2017 – 2019.

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang kontrak antara satu atau lebih pihak *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak *agent*. Berdasarkan teori keagenan, bahwa timbulnya konflik (*agency conflict*) disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajerial didalam perusahaan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar kepemilikan manajer maka manajer perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan dengan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Gray et al.,1995).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (manajer). Penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dapat terbantu ketika adanya kepemilikan saham manajerial. Rasio kepemilikan saham manajerial semakin meningkat maka memungkinkan semakin baik pula kinerja perusahaan. Pada perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial dan manajer merupakan orang yang sama tentunya akan memadankan kepentingan sebagai manajer dengan kepentingan selaku pemegang saham, lain halnya ketika dalam perusahaan manajer bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya pribadinya saja. (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen dapat diminimalkan dengan cara perusahaan meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial.

Hasil penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fadillah (2017) bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan mengacu teori agensi dan penelitian-penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan di ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **2.8.2 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional dapat meminimalisasi munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Dengan adanya monitoring dari kepemilikan institusional dapat mengoptimalkan monitoring kinerja manajemen untuk menghindari adanya perilaku penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen. Sehingga dengan adanya keterlibatan pihak institusional dengan perusahaan dapat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam



setiap keputusan yang diambil oleh manajer sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan saham institusi akan melakukan pengawasan menjadi lebih baik apabila tingkat kepemilikan institusional semakin besar, sehingga menjadikan pengawasan institusional semakin handal dan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Potter (1991) bahwa laporan yang diterbitkan manajemen sebagai sumber informasi bagi pemilikan institusional dalam melakukan aktivitas monitoring merupakan sebuah laporan keuangan periodik.

Hasil penelitian Petta (2017) bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Melihat hasil riset-riset tersebut membuktikan pentingnya kepemilikan institusi dalam kinerja keuangan, maka hipotesis yang akan di ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **2.8.3 Kepemilikan Asing dan Kinerja Keuangan**

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang kontrak antara satu atau lebih pihak *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) yang diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (Hamdani, 2016:30). Fungsi sistem GCG adalah sebagai tongkat penghubung antar investor dan manajemen dalam hal menjalankan hak dan kewajiban dalam lingkungan perusahaan, hal ini terdapat hubungan dengan konsep *agency theory*. Teori agensi memberikan warna baru terhadap pelaksanaan GCG dimana nantinya pihak prinsipal dengan pihak agen dapat melakukan kesepakatan kerjasama yang sifatnya proporsional (Raharjo, 2013).

Kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*) adalah kepemilikan pihak asing dari sejumlah saham perusahaan. Dengan tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada kepemilikan asing (*foreign ownership*) maka

pelaksanaan monitoring para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah karena pemegang saham tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk memonitor manajemen.

Hasil penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013) bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hermiyetti dan Katlanis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Potensi adanya kepemilikan asing mampu meningkatkan iklim persaingan antar perusahaan. Hal ini merupakan suatu hal yang positif, karena dengan meningkatnya persaingan maka perusahaan akan berusaha secara maksimal untuk *survive* dalam persaingan tersebut. Berdasarkan teori agensi dan penelitian-penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan di ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **2.8.4 Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan**

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang kontrak antara satu atau lebih pihak *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori agensi kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) yang diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (Hamdani, 2016:30). Biaya keagenan (*agency cost*) muncul akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* (Hamdani, 2016:30). Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Di dalam *corporate governance* dikenal dengan nama dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan menilai kualitas tata kelola perusahaan.

Fungsi dari dewan komisaris adalah alat kontrol manajemen didalam mengelola perusahaan. Pihak manajemen dalam menjalankan tanggungjawab mengenai pelaporan CSR diharapkan informasi yang disampaikan ke publik

secara luas dan lengkap, hal ini adanya dorongan pengaruh dari kelompok dewan komisaris. Sesuai dengan pendapat Heriyanto (2015) yang menyatakan konsep *stakeholders theory* bahwa dewan komisaris berfungsi sebagai sistem pertanggungjawaban yang harus dicapai dan berfungsi memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan dari *stakeholders*.

Berdasarkan pendapat peneliti sebelumnya, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Profitabilitas sama dengan kinerja ekonomi perusahaan, tingginya kinerja ekonomi perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Perusahaan senantiasa memberikan informasi berkenaan dengan tingginya *corporate value*, hal ini merupakan strategi perusahaan dalam menarik investor untuk menanam sahamnya di perusahaan. Perusahaan dengan tinggi nilai profit dapat menunjukkan informasi yang luas mengenai laporan pertanggungjawaban sosial, hal ini mampu menarik perhatian investor untuk menanamkan sahamnya.

Hasil penelitian Widyati (2013) dan Pangaribuan (2017) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **2.8.5 Komite audit dan Kinerja Keuangan**

Dewan komisari dibantu oleh sejumlah orang yang disebut komite audit, komite audit berfungsi sebagai alat control agar system pengendalian internal perusahaan bisa berjalan dengan efektif (Kasmir, 2012). Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang kontrak antara satu atau lebih pihak *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak *agent* Jensen dan Meckling (1976). Berdasarkan teori agensi, untuk memastikan tanggung jawab agen, pihak prinsipal selaku pemilik perusahaan selalu berusaha mencari informasi dan memberikan intensif. Informasi tersebut di dapat dari pihak komite audit, dimana komite audit adalah yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, pengawasan, dan tata kelola perusahaan. Informasi

yang didapat oleh *principal* merupakan cara untuk mengetahui kemampuan agen dalam menjalankan tugas yang dikelolanya. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pihak komite audit, maka biaya agensi yang dikeluarkan akan semakin rendah. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan seperti keinginan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprianingsih dan Yushita (2016) bahwa komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Sejalan dengan penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2017) membuktikan bahwa komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>5</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **2.8.6 Kepemilikan Manajerial dan CSR**

Teori keagenan mengungkapkan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Kewenangan pengelola (manajer) yang diberikan oleh pemilik perusahaan digunakan untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam teori agensi manajer (*agent*) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham dan karena kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (Hamdani, 2016:30).

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Wahidawati, 2002). Kepemilikan manajerial memperoleh keuntungan khusus atas biaya CSR dari pemegang saham lainnya, struktur kepemilikan saham mempunyai peran penting dalam menetapkan jumlah pengeluaran untuk program CSR. Apabila semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula perusahaan menjalankan program CSR. Menurut teori keagenan

bahwa perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976). Potensi munculnya konflik kepentingan diperlukan penerapan suatu system yang tepat, guna melindungi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham menjadi semakin besar apabila kepemilikan manajerial atas perusahaan semakin kecil. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga konflik kepentingan semakin kecil.

Penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh kepemilikan manajemen dengan CSR pernah dilakukan oleh Listyaningsih (2018) dan Edison (2017) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan teori keagenan dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>6</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

### **2.8.7 Kepemilikan Institusional dan CSR**

Penggunaan teori legitimasi memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar. Perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di lingkungan masyarakat sekitar serta mampu meningkatkan profit, jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar. Untuk itu jika perusahaan memberikan informasi mengenai CSR, maka akan memberikan nilai manfaat untuk perusahaan tersebut. CSR biasanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan menimbulkan *goodwill* diantara pelanggan. Banyak perusahaan yang semakin menyadari pentingnya program CSR sebagai salah satu bagian dari strategi perusahaan dan mendapatkan legitimasi oleh masyarakat (Chernev & Blair, 2015).

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya (Rusdiyanto, 2019). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan

adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat. Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa peran penting kepemilikan institusional adalah kemampuan mengurangi permasalahan keagenan yang terjadi antar manajer dengan investor. Kepemilikan institusional yang semakin besar berpengaruh terhadap semakin efisiennya pemanfaatan aktiva perusahaan serta mampu mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan baik (Wati, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR diantaranya adalah Chang et al. (2011) dan Edison (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>7</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

### **2.8.8 Kepemilikan Asing dan CSR**

Menurut teori keagenan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi memberikan warna baru terhadap pelaksanaan GCG dimana nantinya pihak *principal* dengan pihak *agent* dapat melakukan kesepakatan kerjasama yang sifatnya proporsional (Raharjo, 2013). GCG adalah komponen penting yang harus dijalankan perusahaan agar terjadi komunikasi yang baik antara pihak manajemen dan pemegang saham, serta pemangku kepentingan yang lain. (Raharjo, 2013).

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga atau institusi terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing merupakan pihak yang memiliki perhatian lebih terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Machmud dan Djakman (dalam Sudarno, 2014)

menjelaakan bahwa perusahaan multinasional terutama perusahaan Eropa dan *United State* sangat mengedepankan isu-isu sosial dan isu lingkungan. Dengan demikian apabila perusahaan memiliki kerja sama dengan kepemilikan asing, maka perusahaan tersebut akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR. Sehingga pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan multinasional diyakini lebih tinggi dibanding dengan perusahaan nasional.

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR (Listyaningsih, 2018). Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Chang et al. (2011) dan Edison (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap CSR.

Hasil penelitian Listyaningsih (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini didukung oleh Chang et al. (2011) dan Edison (2017) membuktikan adanya pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>8</sub>: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

### **2.8.9 Ukuran Dewan Komisaris dan CSR**

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas diharuskan memiliki dewan komisaris sebagai alat monitoring manajemen. Dewan komisaris adalah pengendali internal tertinggi di organisasi perusahaan. Menurut KNKG (2004) dalam Heriyanto (2015) bahwa tugas dari dewan komisaris yang pertama mengawasi jalannya perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab dewan komisaris, kedua menyampaikan opini-opini kepada dewan direksi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, ketiga sebagai alat kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya pelaksanaan GCG. Dengan melaporkan laporan keuangan yang lebih lengkap maka setidaknya manajemen dapat mengurangi masalah keagenan yang rawan muncul dalam hubungan manajer dengan pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris yang berperan sebagai pihak intern yang mengawasi manajemen dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

Pihak manajemen dalam menjalankan tanggungjawab mengenai pelaporan CSR diharapkan informasi yang disampaikan ke publik secara luas dan lengkap,

hal ini adanya dorongan pengaruh dari kelompok dewan komisaris. Heriyanto (2015) yang menyatakan konsep *stakeholders theory* bahwa dewan komisaris berfungsi sebagai sistem pertanggungjawaban yang harus dicapai dan berfungsi memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan dari *stakeholders*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan akan semakin baik.

Hasil penelitian terdahulu dari Khoirudin (2013) dan Nurman dan Miranti (2013) memperlihatkan adanya pengaruh signifikan antara dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>9</sub>: Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

#### **2.8.10 Komite Audit dan CSR**

CSR yang akan diungkapkan oleh perusahaan bisa dipengaruhi dari keberadaan komite audit selaku salah satu komponen dari GCG. Dewan komisari dibantu oleh sejumlah orang yang disebut komite audit, komite audit berfungsi sebagai alat control agar system pengendalian internal perusahaan bisa berjalan dengan efektif (Kasmir, 2012). Disini diuraikan tugas komite audit, sebagai berikut: (1) pertama sebagai alat pengendali manajemen, (2) kedua pengelola munculnya konflik pada saat pelaksanaan audit intern maupun ekstern, (3) ketiga penelaah mengenai ketaatan dalam menjalankan regulasi yang berlaku, serta mampu menjadi pihak yang professional dan independen. Melihat hal tersebut diharapkan perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai dasar bahwa perusahaan menjalankan mekanisme GCG.

Berdasarkan teori agensi, untuk memastikan tanggung jawab agen, pihak prinsipal selaku pemilik perusahaan selalu berusaha mencari informasi dan memberikan intensif. Prinsipal menunjuk komite audit dalam kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan, diantaranya adalah: pertama laporan keuangan, kedua monitoring, dan ketiga mengenai tata kelola perusahaan. Tingkat hasil usaha yang diperoleh agen dapat diukur berdasarkan informasi yang



didapat oleh prinsipal. detailnya monitoring yang dilakukan pihak komite audit mampu mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan.

Hasil penelitian Fauzyyah (2018) memperlihatkan adanya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan penelitian Susanti (2013) memperlihatkan munculnya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>10</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

### **2.8.11 Kinerja Keuangan dan CSR**

Kinerja keuangan perusahaan merupakan alat analisis yang digunakan oleh pemegang saham dalam menilai analisis fundamental perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berupa dividen bagi pemegang saham dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan kondisi semakin meningkatnya laba yang didapat perusahaan, merupakan bukti terdapat hubungan positif nilai kinerja keuangan (profitabilitas) dengan CSR. Tingginya nilai kinerja keuangan maka akan semakin baik perusahaan dalam menginformasikan pengungkapan CSR, walaupun perusahaan harus menanggung biaya yang lebih besar. Perusahaan tertarik memberikan informasi laporan tahunan lebih detail, yaitu dalam rangka pengurangan biaya politik dan apabila perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi mampu memperlihatkan *financial performance* kepada publik sehingga perusahaan memiliki kekuatan dalam menjalankan suatu regulasi.

Perusahaan adalah suatu entitas yang harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya*, tidak hanya berbisnis untuk kepentingannya sendiri, hal ini sesuai dengan teori *stakeholders*. Semakin tinggi tingkat kinerja keuangan maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Manajemen perusahaan dalam merencanakan sebuah laporan harus sesuai dengan kemauan dan kekuatan dari pihak *stakeholders*, hal ini merupakan cerminan dari teori *stakeholders*. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cerminan suatu pendekatan manajemen dalam menghadapi lingkungan yang

dinamis dan multi dimensi serta kemampuan untuk mempertemukan tekanan sosial dengan reaksi kebutuhan masyarakat.

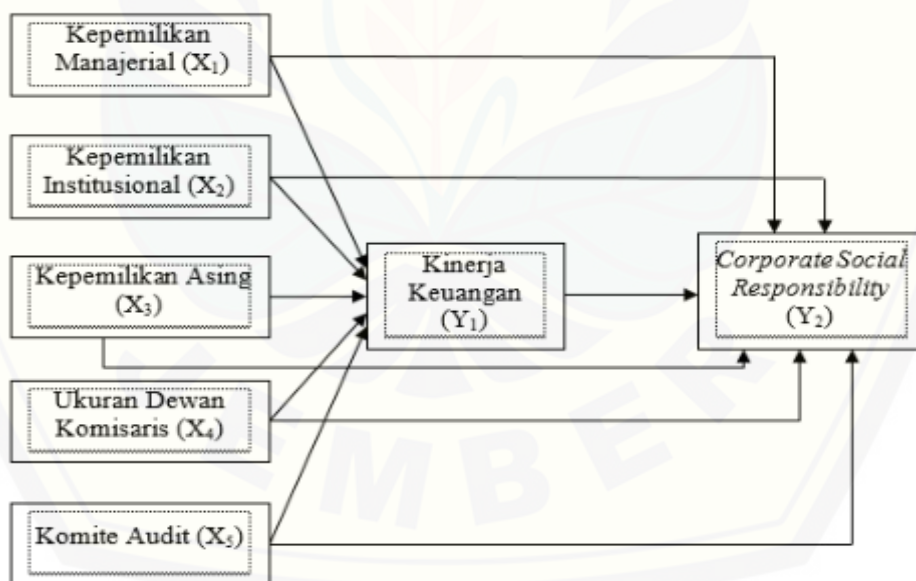
Hasil penelitian dari Nurman dan Miranti (2013) membuktikan bahwa adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Othman et al (2009) membuktikan bahwa adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>11</sub>: Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

## 2.10 Kerangka Konseptual

Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility* CSR melalui kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Menurut gambar diatas, bahwa dalam penelitian ini variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan komite audit akan diuji ada tidaknya pengaruh terhadap variabel CSR melalui variabel intervening yaitu kinerja keuangan.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Riset ini tergolong penelitian explanatori yaitu jenis penelitian bertujuan untuk menguji suatu hipotesis/teori sehingga mampu memberikan penguatan atau penolakan dari hipotesis/teori terdahulu, dengan cara menganalisis data menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbentuk *annual report* selama tahun 2017 – 2019 dari perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Kelompok, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki ciri karakteristik tertentu merupakan definisi dari populasi (Indriantoro dan Supomo, 2014). Penelitian ini populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel merupakan bagian dari komponen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Data laporan tahunan yang digunakan adalah laporan tiga tahun terakhir yakni laporan tahunan tahun 2017 – 2019. Pemilihan tahun penelitian dikarenakan saat ini perusahaan mengacu pada panduan GRI-G4 2016 dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dan sebagai data yang terbaru. Metode *jugment sampling* merupakan metode peneliti dalam mengambil sampel. Metode tersebut adalah bagian dari bentuk metode *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2017 – 2019
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2017 – 2019

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki informasi lengkap terkait variabel penelitian yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, pengungkapan CSR, dan konsisten memperoleh laba selama periode 2017 – 2019.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Riset ini memakai variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel terikat (*dependent*) dan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan dewan komisaris, serta komite audit sebagai variabel bebas (*independent*), serta variabel intervening yaitu kinerja keuangan.

#### 3.3.1 Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014), bahwa variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah definisi dari variabel dependen. CSR adalah variabel terikat didalam riset ini. CSR didefinisikan sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan dari tindakan sosial, di luar kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum (McWilliams dan Siegel, 2001) dalam Ilmi (2017). Pengungkapan CSR dinyatakan dalam indeks pengukuran yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Perbandingan jumlah skor yang ada dengan nilai skor keseluruhan merupakan perolehan dari nilai indeks. Indeks GRI yang digunakan adalah panduan GRI-G4 2016 dikarenakan periode sampel pada penelitian ini tahun 2017 – 2019 dimana perusahaan mengacu pada panduan GRI-G4 2016 dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. GRI 2016 memiliki 91 indikator dan dibuat secara universal supaya bisa digunakan seluruh *corporation*. *Check list* daftar *item* pengungkapan CSR dihitung menggunakan variabel *dummy*, dimana apabila perusahaan tidak mengungkapkan CSR pada instrumen penelitian, maka diberi skor 0, dan jika perusahaan mengungkapkan CSR pada instrumen penelitian, maka diberi skor 1. Hasil skor tiap item akan ditotal setiap masing-masing perusahaan. Rumus CSRD adalah: (Hadi, 2018).

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan :

CSRDI<sub>j</sub> : CSR Disclosure Index perusahaan j pada tahun i

n<sub>j</sub> : Jumlah kriteria pengungkapan CSR untuk perusahaan j,  $n_j \leq 91$

X<sub>ij</sub> : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j pada tahun i

### 3.3.2 Variabel Bebas (Independent)

Variabel independen juga diartikan sebagai variabel yang menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat (terkait). Variabel bebas yang terdapat dalam riset ini, adalah:

#### 1. Kepemilikan Manajerial

Definisi kepemilikan manajerial yaitu persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial (manajer dan dewan direksi) terhadap total saham yang beredar pada perusahaan (Sartono, 2010). Rumus menghitung kepemilikan manajerial.

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 2. Kepemilikan Institusional

Definisi kepemilikan institusi merupakan institusi yang memiliki saham perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga dibagi dengan jumlah saham yang beredar Sartono (2010). Rumus menghitung kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 3. Kepemilikan Asing

Definisi kepemilikan asing yaitu saham yang dimiliki oleh pihak asing yang berbentuk badan usaha asing. Kepemilikan asing dalam penelitian ini

menggunakan persentase kepemilikan saham asing yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari satu pemilikan asing yang memiliki saham perusahaan (Sissandhy & Sudarno, 2014). Rumus menghitung kepemilikan manjerial.

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 4. Ukuran Dewan Komisaris

Definisi ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam riset ini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dan disebutkan dalam *annual report* perseroan. Formula yang digunakan adalah: (Khoirudin, 2013)

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}$$

#### 5. Komite Audit

Komite audit adalah kepanjangan tangan dewan komisaris karena berperan membantu kinerja dewan komisari. Riset ini didalam menentukan ukuran komite audit dilakukan dengan menjumlah anggota komite audit yang perusahaan miliki serta harus tercatat didalam *annual report*. Formula yang digunakan menentukan ukuran komite audit. (Ratnasari, 2011)

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah seluruh anggota komite audit}$$

### 3.3.3 Variabel Intervening

Profitabilitas merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan, apabila perusahaan memiliki nilai *financial performance* tinggi maka mengarah untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas. Riset ini untuk menentukan nilai profitabilitas diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Nilai profitabilitas ini menggunakan simbol ROA dan memakai satuan mata uang rupiah. Formula *Return on Asset* (ROA). (Fahmi, 2017:51)

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan dalam riset ini. Tujuan dilakukannya perhitungan statistik deskriptif adalah untuk mengetahui kondisi data dari tiap-tiap variabel penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:170) bahwa gambaran mengenai keunikan dari tiap-tiap variable dan melihat ada tidaknya hubungan anatar variabel merupakan pengertian dari statistik deskriptif. Informasi yang didapat semakin mudah dimengerti jika menggunakan analisis deskriptif. Riset ini memakai aplikasi SPSS versi 22 sebagai alat bantu dalam analisis data.

#### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.4.2.1 Uji Normalitas Data

Hasil pengujian memperlihatkan nilai residual berdistribusi normal atau malah sebaliknya, hasil tersebut menunjukkan tujuan diterapkannya uji normalitas data. (Ghozali, 2013:160). Data berdistribusi normal atau mendekati normal adalah model regresi yang baik. Pengujian normalitas dalam riset ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai probabilitas signifikan. > 0.05, maka data berdistribusi normal dan berlaku sebaliknya.

##### 3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen (Winarno, 2015). Ada tidaknya korelasi antar variable independen adalah tujuan dari uji multikolinearitas, dan model regresi akan dinyatakan baik apabila tidak adanya korelasi antar variable independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan menggunakan VIF dan nilai *Tolerance* pada masing-masing persamaan (Ghozali, 2013). Jika nilai VIF yang melebihi 10. dan nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,10, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas dan apabila nilai VIP

lebih kecil 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10, maka mengindikasikan tidak adanya multikolinieritas. (Ghozali, 2013; Winarno, 2015)

### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Terjadinya ketidaksamaan varians dari residu dalam pengamatan yang berbeda, hasil tersebut dapat diamati menggunakan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Dikatakan data dikatakan homoskedastisitas apabila nilai *variens* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Sedangkan apabila hasilnya berbeda maka dikatakan data heteroskedastisitas. Apabila menghasilkan data yang homoskedastisitas, dapat disimpulkan model regresinya baik. Dapat disimpulkan apabila nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka terdapat heteroskedastisitas.

### 3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Statistik Durbin Watson adalah suatu prosedur rutin yang umum ditemukan pada banyak software statistik, sehingga yang dilakukan adalah melihat apakah nilai yang dimaksud terletak di antara  $d_U < d < 4-d_U$ , untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi (Ariefianto, 2012; Gujarati, 2015). Dimana  $d_L$  dan  $d_U$  adalah batas bawah dan batas atas nilai kritis. (Ariefianto, 2012)

**Tabel 3.1 Uji Durbin Watson  $d$ : Aturan pengambilan keputusan**

Hipotesis null	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4-d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	Diterima	$d_U < d < 4-d_U$

Sumber: Gujarati (2015)

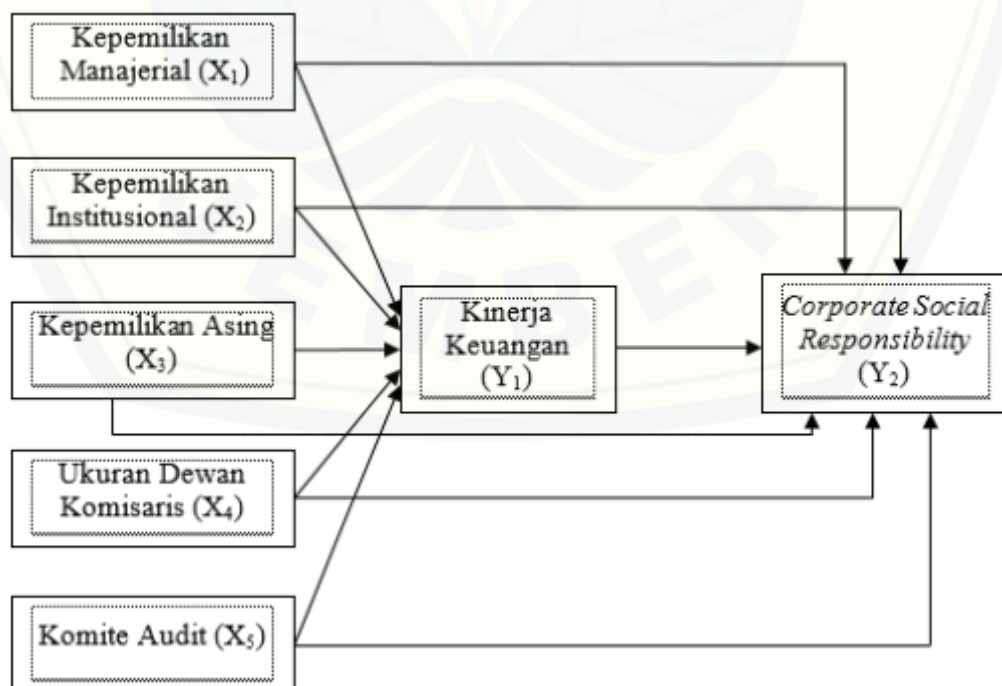


### 3.4.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

SPSS (*Statistical Package for Social Sciences* yaitu *software*) berfungsi untuk menganalisa data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan *basic windows*, pengertian ini menurut Ghozali (2013:15). Analisis data dalam penelitian yaitu: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis jalur, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F.

*Path Analysis* ini digunakan untuk menganalisis hubungan yang saling menyebabkan antara variabel satu dengan lainnya dan menguji hipotesis dalam riset ini secara matematis serta dengan bantuan *software* SPSS. Dengan menggunakan *path analysis* nantinya akan dilakukan estimasi pengaruh yang saling menyebabkan antar variabel dan kedudukan masing-masing variabel dalam jalur baik secara langsung maupun tidak langsung. *Trimming theory* dilakukan apabila terjadi jalur yang tidak signifikan. Teori ini dilakukan dengan cara menghilangkan atau menghapus jalur yang tidak signifikan. Signifikansi model dapat dilihat dari koefisien beta ( $\beta$ ) yang signifikan terhadap jalur.

Gambar 3.1 Diagram Jalur



Model *path analysis* yang digunakan dalam riset ini dapat dilihat dalam persamaan struktural berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_{Y_1X_1} Y_1 + \beta_{Y_1X_2} Y_1 + \beta_{Y_1X_3} Y_1 + \beta_{Y_1X_4} Y_1 + \beta_{Y_1X_5} Y_1 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_{Y_2X_1} Y_2 + \beta_{Y_2X_2} Y_2 + \beta_{Y_2X_3} Y_2 + \beta_{Y_2X_4} Y_2 + \beta_{Y_2X_5} Y_2 + \beta_{Y_1} Y_2 + \epsilon \dots \dots (2)$$

Keterangan:

$X_1$  : Kepemilikan manajerial i pada periode t

$X_2$  : Kepemilikan institusional i pada periode t

$X_3$  : Kepemilikan asing i pada periode t

$X_4$  : Dewan komisaris perusahaan i pada periode t

$X_5$  : Komite audit perusahaan i pada periode t

$Y_1$  : Profitabilitas perusahaan i pada periode t

$Y_2$  : Tingkat CSR perusahaan i pada periode t

#### 3.4.4 Menghitung Jalur

Menurut Ghozali (2016:238) bahwa besarnya nilai pengaruh *Indirect Effect* adalah dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya, yaitu koefisien variabel bebas ke variabel intervening dikalikan dengan variabel intervening ke variabel terikat. Setelah data diuji signifikasinya, maka dilanjutkan pengujian untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh *Direct Effect* dan *Indirect Effect*. Berikut ini adalah model analisis jalur:

##### a. Analisis Jalur Model Dekomposisi

###### ✓ Pengaruh Langsung (*Direct Effect* atau DE)

1. Pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan.

$$DE_{Y_1X_1} = X_1 \rightarrow Y_1$$

2. Pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

$$DE_{Y_1X_2} = X_2 \rightarrow Y_1$$

3. Pengaruh variabel kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan.

$$DE_{Y_1X_3} = X_3 \rightarrow Y_1$$

4. Pengaruh variabel ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

$$DE_{Y_1X_4} = X_4 \rightarrow Y_2$$

5. Pengaruh variabel komite audit terhadap kinerja keuangan.

$$DE_{Y_1X_5} = X_5 \rightarrow Y_2$$

6. Pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap CSR.

$$DEY_2X_1 = X_1 \rightarrow Y_2$$

7. Pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap CSR.

$$DEY_2X_2 = X_1 \rightarrow Y_2$$

8. Pengaruh variabel kepemilikan asing terhadap CSR.

$$DEY_2X_3 = X_1 \rightarrow Y_2$$

9. Pengaruh variabel ukuran dewan komisaris terhadap CSR.

$$DEY_2X_4 = X_1 \rightarrow Y_2$$

10. Pengaruh variabel komite audit terhadap CSR.

$$DEY_2X_5 = X_2 \rightarrow Y_1$$

11. Pengaruh variabel kinerja keuangan terhadap CSR.

$$DEY_2Y_1 = Y_1 \rightarrow Y_2$$

✓ Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect atau IE*)

1. Pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap CSR melalui kinerja keuangan.

$$IEY_2Y_1X_1 = X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$$

2. Pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap CSR melalui kinerja keuangan.

$$IEY_2Y_1X_2 = X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$$

3. Pengaruh variabel kepemilikan asing terhadap CSR melalui kinerja keuangan.

$$IEY_2Y_1X_3 = X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$$

4. Pengaruh variabel ukuran dewan komisaris terhadap CSR melalui kinerja keuangan.

$$IEY_2Y_1X_4 = X_4 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$$

5. Pengaruh variabel komite audit terhadap CSR melalui kinerja keuangan.

$$IEY_2Y_1X_5 = X_5 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$$

### 3.4.5 Pengujian Hipotesis

Alat uji yang dipakai untuk melihat kemampuan variabel bebas secara sendiri-sendiri dalam mendeskripsikan tingkahlaku pada variabel terikat adalah menggunakan uji t.test (Ghozali, 2013:99). Pengujian ini menggunakan tingkat taraf signifikan 0,05. Kriteria aturan pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka hipotesis diterima. Begitupula sebaliknya apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 – 2019. Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil analisis, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial atas saham perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari kinerja keuangan perusahaan
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional atas saham perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari kinerja keuangan perusahaan
3. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa ketika jumlah kepemilikan asing atas saham perusahaan semakin tinggi maka kinerja keuangan perusahaan kan semakin meningkat
4. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari kinerja keuangan perusahaan
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit bukan merupakan ukuran yang tepat untuk menilai efektifitas komite audit dalam mengawasi kinerja manajemen,

sehingga tidak mampu mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari kinerja keuangan perusahaan

6. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Artinya bahwa semakin besar jumlah kepemilikan manajerial atas saham perusahaan maka semakin luas pengungkapan CSR
7. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Artinya bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional atas saham perusahaan tidak mempengaruhi luas tidaknya pengungkapan CSR
8. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Artinya bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan asing atas saham perusahaan tidak mempengaruhi luas tidaknya pengungkapan CSR
9. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Artinya bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi luas tidaknya pengungkapan CSR
10. Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Arah hubungan yang negatif, hal ini bermakna bahwa semakin besar nilai komite audit maka akan semakin menurunkan pengungkapan CSR
11. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Artinya besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tidak dapat mempengaruhi luas tidaknya pengungkapan CSR.
12. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan tidak mampu memediasi antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran dewan komisaris, terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi variabel kinerja keuangan mampu memediasi antara komite audit terhadap pengungkapan CSR.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya memakai sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak bisa digeneralisir ke seluruh sektor perusahaan lain yang *go public*
2. Periode penelitian hanya 3 (tiga) tahun pengamatan, yaitu tahun 2017 – 2019. Sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas yaitu sejumlah 51 observasi.
3. Perhitungan variabel kinerja keuangan hanya menggunakan rasio keuangan profitabilitas yaitu analisis ROA. Sedangkan kinerja keuangan masih dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan yang lain

## 5.3 Saran

Dari beberapa keterbatasan yang ada dipenelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada sektor perusahaan yang lain, seperti sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah tahun penelitian sehingga didapatkan jumlah sampel perusahaan yang lebih banyak dan hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan rasio pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang lain seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, atau rasio nilai pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan IC. Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Agustin et.al. 2013. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Islamic Finance and Business Review*. Volume 5 Nomor 1. Hal 54 - 75.
- Aprianingsih, A., dan A. N. Yushita. 2016. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(4).
- Astuti, R. N. P., dan R. Trisnawati. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Manufaktur Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Serta Dampaknya Terhadap Reaksi Investor (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Paper dan The 2nd Call for Syariah Paper-ISSN. 2460-0784*.
- Azheri, B. 2011. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bangun, N., J. Octavia, dan K. B. Tarigan. 2012. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 717-738.
- Dewi, A. S., D. Sari, dan H. Abaharis. 2018. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3(3), 445-454.
- Edison A. 2017. Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 11, No. 2.
- Eriandani, R. (2013). Pengaruh Institutional Ownership dan Managerial Ownership terhadap Pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris



- pada Perusahaan Manufaktur 2010-2011. *Simposium Nasional Akuntansi XVI. Universitas Negeri Surabaya.*
- Ettredge, Johnstone, Stone dan Wang. 2010. The effects of company size, corporate governance quality, and bad news on disclosure compliance. *Review of Accounting Studies*, Forthcoming.
- Fadillah, A. R. 2017. Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 37-52.
- Fahmi, I. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan.* Bandung: Alfabeta.
- Fauzyyah, R., dan S. Rachmawati. 2018. the Effect of Number of Meetings of the Board of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee and Ownership Structure Upon the Extent of Csr Disclosure. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(02), 41-54.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. dan C. Anis. 2014, *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Heriyanto. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hermiyetti, H., dan E. Katlanis. 2017. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Media Riset Akuntansi*, 4(2), Hal-93.

- Hadiyanti, E., K. Kamaliah, dan D. Desmiyawati. 2016. Pengaruh Manajemen Laba Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibilities Serta Implikasinya Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Kelompok LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 136.
- Hisamuddin N. dan M. Y. Tirta. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*. Vol.10 No.2.
- Ilmi, M., A. S. Kustono, dan Y. Sayekti. 2017. Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure and Managerial Ownership to The Corporate Value with Financial Performance as Intervening Variables: Case on Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Social Science and Business*, 1(2), 75-88.
- Indriantoro dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPF E.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kariza, A. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi revisi 12. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoirudin, A. 2013. Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kurnianingsih, H. T. 2014. Pengaruh Profitabilitas dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 13(1).
- Listyaningsih, E., R. Dewi, dan N. Baiti. 2018. The Effect of Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE)*, 4(3), 273.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Nilayanti, M., dan I. G. N. A. Suaryana. 2019. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 906-936.
- Nurkhin, A. 2010. Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 2 No. 1.
- Nurman, R. dan K. D. Miranti. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI). Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Oh, W. Y., Y. K. Chang, dan A. Martynov. 2011. The effect of ownership structure on corporate social responsibility: Empirical evidence from Korea. *Journal of business ethics*, 104(2), 283-297.
- Othman, R., A. M. Thani, dan E. K. Ghani. 2009. Determinants of Corporate Social Responsibility Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Resarch Journal of International Studies*, 12, pg. 4-20.
- Pangaribuan, R. C. 2017. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Pengelolaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Indonesia Banking School*.
- Pebriana, K. U. S., dan I. M. Sukartha. 2012. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Komposisi Dewan Direksi, dan Kepemilikan Institusional Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1-16
- Petta, B. C., dan J. Tarigan. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). *Business Accounting Review*, 5(2), 625-636.
- Prahesti, D. S., dan N. Abundanti. 2015. *Pengaruh risiko kredit, struktur kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Priantana, R. D. dan Y. Ade. 2011. Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan

- Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 4. No. 1.
- Pujayanti, A. 2016. Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1.
- Raditya, A. N. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Sukandar, P. P., dan R. Rahardja. 2014. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 689-695.
- Ratnasari Y. 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam *Sustainability Report*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Riswari, D.A., dan N. Cahyonowati. 2012. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan Publik Non Finansial yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1. Hal. 1-12. Semarang : UNDIP.
- Roziq, A., dan H. N., Danurwenda. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Melalui Risiko Bisnis dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1), 90-109.
- Rusdiyanto, S., Susetyorini, dan U. Elan. 2019. *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarafina, S., dan M. Saifi. 2017. Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(3), 108-117.

- Sari, A. R., Sutrisno, dan E. G. Sukuharsono. 2013. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11 No. 3, 481-491.
- Sari, L. P. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi*.
- Soliman, M., M. El Din, and A. Sakr. 2013. Ownership Structure And Corporate Social Responsibility (CSR): An Empirical Study of The Listed Companies In Egypt. *International Journal of Social Scinces*. Vol. 5 No. 1, ISSN: 2305-4557.
- Sudarno, A.K.S. 2014. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accaounting*. Vol. 3, No. 2, ISSN: 2337-3806.
- Susanti, S. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan *Cosmetics And Household*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1.
- Widyati, M. F. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemimpinan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Winarno, W. W. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews: Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiranata, Y. A., dan Y. M. Nugrahanti. 2013. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 15-26.
- Zhuang, J., D. Edwards, dan M. V. A. Capulong. 2001. *Corporate Governance & Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand*. Asian Development Bank.

## Lampiran 1. Rekapitulasi Data Penelitian

No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	MANAJERIAL	INSTITUSIONAL	ASING	SAHAM BEREDAR
1	2017	KBLM	100000000	9133812000	50618800	1120000000
2	2017	BRAM	124934471	25231500	270923182	450000000
3	2017	HDTX	36400000	312200000	1065788300	1532571000
4	2017	TCID	285225	36152540	122319485	201066667
5	2017	PSDN	23735000	250500000	787621210	1440000000
6	2017	SKLT	864000	267354250	396386250	690740500
7	2017	ULTJ	2919111000	3267058124	5367358876	11553528000
8	2017	KICI	313080	60195140	53721200	138000000
9	2017	SULI	1439240382	217770200	1122031819	3986916802
10	2017	IKAI	24000000	296757000	326383786	791383786
11	2017	BRPT	34054383	518825200	4221770453	6979892784
12	2017	DPNS	18910440	165090213	55652738	331129952
13	2017	SRSN	3039953512	1974198800	1005847688	6020000000
14	2017	TPIA	2633449995	7401917600	5451715305	17833520260
15	2017	GDST	63800000	873489500	7159870000	8200000000
16	2017	NIKL	11600000	633400000	1387842500	2523350000
17	2017	PICO	465000	101463000	432875000	568375000
18	2018	KBLM	100000000	854083640	103022200	1120000000
19	2018	BRAM	129934471	25231500	270923182	450000000
20	2018	HDTX	36400000	312200000	1065788300	1532571000
21	2018	TCID	284892	26015278	122319485	201066667
22	2018	PSDN	23786000	250500000	787621210	1440000000
23	2018	SKLT	864000	267354250	396386250	690740500
24	2018	ULTJ	2919111000	3267058124	5367358876	11553528000
25	2018	KICI	313080	60195140	54428400	138000000
26	2018	SULI	1439240382	217770200	1122031819	3986916802
27	2018	IKAI	24000000	296757000	326383786	791383786
28	2018	BRPT	106972483	517970200	4188207953	6979892784
29	2018	DPNS	18910440	169655213	50438238	331129952
30	2018	SRSN	3039953512	1974198800	1005847688	6020000000
31	2018	TPIA	2633449995	7401917600	5451715305	17833520260
32	2018	GDST	1104400	874856000	7159870000	8200000000
33	2018	NIKL	11600000	633400000	1387842500	2523350000

No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	MANAJERIAL	INSTITUSIONAL	ASING	SAHAM BEREDAR
34	2018	PICO	465000	101463000	432875000	568375000
35	2019	KBLM	100000000	9159608000	40392	1120000000
36	2019	BRAM	124934471	25231500	270923182	450000000
37	2019	HDTX	36400000	686000000	691988300	1532571000
38	2019	TCID	273004	26015278	122319485	201066667
39	2019	PSDN	23786000	250500000	787621210	1440000000
40	2019	SKLT	864000	267354250	396386250	690740500
41	2019	ULTJ	2919111000	3267058124	5367358876	11553528000
42	2019	KICI	313080	60195140	54428400	138000000
43	2019	SULI	1294081682	583052349	1116006509	3986916802
44	2019	IKAI	24000000	296757000	326383786	791383786
45	2019	BRPT	111409683	517970200	4188207953	6979892834
46	2019	DPNS	656095	198235935	22538303	331129952
47	2019	SRSN	3039953512	1974198800	1005847688	6020000000
48	2019	TPIA	2494775195	7847985740	7442314671	17833520260
49	2019	GDST	70150000	876219400	7159870000	8200000000
50	2019	NIKL	11600000	633400000	1387842500	2523350000
51	2019	PICO	385080	101463000	432875000	568375000

No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	KM (X1)	KI (X2)	KA (X3)	UDK (X4)	UKA (x5)
1	2017	KBLM	0,089286	8,155189	0,045195357	3	3
2	2017	BRAM	0,277632	0,05607	0,602051516	5	3
3	2017	HDTX	0,023751	0,20371	0,695425073	3	3
4	2017	TCID	0,001419	0,179804	0,608352875	6	3
5	2017	PSDN	0,016483	0,173958	0,546959174	6	3
6	2017	SKLT	0,001251	0,387055	0,573856969	3	3
7	2017	ULTJ	0,25266	0,282776	0,464564493	3	3
8	2017	KICI	0,002269	0,436197	0,389284058	3	3
9	2017	SULI	0,360991	0,054621	0,281428451	4	3
10	2017	IKAI	0,030327	0,374985	0,412421624	3	3
11	2017	BRPT	0,004879	0,074331	0,604847465	4	3
12	2017	DPNS	0,057109	0,498566	0,168069175	3	3
13	2017	SRSN	0,504976	0,32794	0,167084334	8	3
14	2017	TPIA	0,147669	0,415056	0,305700458	7	3
15	2017	GDST	0,00778	0,106523	0,873154878	3	3
16	2017	NIKL	0,004597	0,251016	0,55	3	3
17	2017	PICO	0,000818	0,178514	0,761601056	3	3
18	2018	KBLM	0,089286	0,762575	0,091984107	3	3
19	2018	BRAM	0,288743	0,05607	0,602051516	5	3
20	2018	HDTX	0,023751	0,20371	0,695425073	3	4
21	2018	TCID	0,001417	0,129386	0,608352875	6	3
22	2018	PSDN	0,016518	0,173958	0,546959174	6	3
23	2018	SKLT	0,001251	0,387055	0,573856969	3	3
24	2018	ULTJ	0,25266	0,282776	0,464564493	3	3
25	2018	KICI	0,002269	0,436197	0,394408696	3	3
26	2018	SULI	0,360991	0,054621	0,281428451	4	3
27	2018	IKAI	0,030327	0,374985	0,412421624	3	3
28	2018	BRPT	0,015326	0,074209	0,60003901	4	3
29	2018	DPNS	0,057109	0,512352	0,152321582	3	3
30	2018	SRSN	0,504976	0,32794	0,167084334	8	3
31	2018	TPIA	0,147669	0,415056	0,305700458	7	3
32	2018	GDST	0,000135	0,10669	0,873154878	3	3
33	2018	NIKL	0,004597	0,251016	0,55	3	3
34	2018	PICO	0,000818	0,178514	0,761601056	3	3



No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	KM (X1)	KI (X2)	KA (X3)	UDK (X4)	UKA (x5)
35	2019	KBLM	0,089286	8,178221	3,60643E-05	3	3
36	2019	BRAM	0,277632	0,05607	0,602051516	3	3
37	2019	HDTX	0,023751	0,447614	0,451521202	5	3
38	2019	TCID	0,001358	0,129386	0,608352875	6	3
39	2019	PSDN	0,016518	0,173958	0,546959174	6	3
40	2019	SKLT	0,001251	0,387055	0,573856969	3	3
41	2019	ULTJ	0,25266	0,282776	0,464564493	3	3
42	2019	KICI	0,002269	0,436197	0,394408696	3	3
43	2019	SULI	0,324582	0,146241	0,27991718	4	3
44	2019	IKAI	0,030327	0,374985	0,412421624	3	3
45	2019	BRPT	0,015962	0,074209	0,600039005	4	3
46	2019	DPNS	0,001981	0,598665	0,068064827	3	3
47	2019	SRSN	0,504976	0,32794	0,167084334	8	3
48	2019	TPIA	0,139892	0,440069	0,417321682	7	2
49	2019	GDST	0,008555	0,106856	0,873154878	3	3
50	2019	NIKL	0,004597	0,251016	0,55	3	3
51	2019	PICO	0,000678	0,178514	0,761601056	3	3

No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	Laba Bersih	Tota Aset	ROA (Y1)	CSR Dij (Y2)
1	2017	KBLM	43.995	1.235.199	0,035617743	0,21978
2	2017	BRAM	20632	676739	0,030487381	0,373626
3	2017	HDTX	26234	1004802	0,026108626	0,087912
4	2017	TCID	14650163	1038706009	0,014104244	0,21978
5	2017	PSDN	2618905	147788000	0,017720688	0,164835
6	2017	SKLT	11410	603032	0,018921052	0,197802
7	2017	ULTJ	1874879	241571728	0,007761169	0,164835
8	2017	KICI	2518	199175	0,012642149	0,153846
9	2017	SULI	1789900	138196341	0,012951862	0,175824
10	2017	IKAI	1934188	166679000	0,011604269	0,142857
11	2017	BRPT	2793	174437	0,016011511	0,186813
12	2017	DPNS	23321	750320	0,031081405	0,186813
13	2017	SRSN	29044	1126248	0,025788281	0,164835
14	2017	TPIA	21443042	11247008	1,906555237	0,208791
15	2017	GDST	3027466	177091000	0,017095538	0,153846
16	2017	NIKL	13771	709330	0,019414095	0,230769
17	2017	PICO	2978	266305	0,011182666	0,10989
18	2018	KBLM	2008	213542	0,009403302	0,208791
19	2018	BRAM	2175824	153773957	0,014149496	0,373626
20	2018	HDTX	1860845	173253491	0,010740592	0,087912
21	2018	TCID	3828	178257	0,021474612	0,21978
22	2018	PSDN	25852	824788	0,031343812	0,164835
23	2018	SKLT	32418	1296898	0,024996569	0,197802
24	2018	ULTJ	25851937	1202252094	0,021502925	0,153846
25	2018	KICI	2807923	211034000	0,013305548	0,153846
26	2018	SULI	15092	14044000	0,001074623	0,153846
27	2018	IKAI	3482428	266781498	0,013053484	0,142857
28	2018	BRPT	3187	207204	0,015380977	0,186813
29	2018	DPNS	2638064	173582894	0,015197719	0,186813
30	2018	SRSN	2262245	177532858	0,012742683	0,164835
31	2018	TPIA	4107	186762	0,021990555	0,197802
32	2018	GDST	338.130	1.523.517	0,221940418	0,153846

No	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	Laba Bersih	Tota Aset	ROA (Y1)	CSRDij (Y2)
33	2018	NIKL	4.658	34.367	0,135536998	0,186813
34	2018	PICO	4.961	96.537	0,051389623	0,131868
35	2019	KBLM	1.224.807	2.889.501	0,42388184	0,175824
36	2019	BRAM	1.760.434	17.591.706	0,100071818	0,340659
37	2019	HDTX	121.012	369.068	0,327885376	0,087912
38	2019	TCID	127123	4.394.124	0,028930226	0,21978
39	2019	PSDN	40.360	764.480	0,052794056	0,164835
40	2019	SKLT	323142	5683123	0,056859934	0,197802
41	2019	ULTJ	255.089	2.631.190	0,096948149	0,153846
42	2019	KICI	701.607	5.555.871	0,12628209	0,153846
43	2019	SULI	1.026.231	5.186.940	0,197849021	0,153846
44	2019	IKAI	91.748	1.816.406	0,050510734	0,142857
45	2019	BRPT	332.312	1.109.840	0,29942334	0,186813
46	2019	DPNS	100.378	1.168.956	0,085869785	0,175824
47	2019	SRSN	4.989.254	28.901.948	0,172626911	0,153846
48	2019	TPIA	7.385.228	82.174.515	0,089872487	0,208791
49	2019	GDST	5.206.561	31.619.514	0,164662904	0,131868
50	2019	NIKL	7.658.554	87.939.488	0,087088908	0,164835
51	2019	PICO	1.780.020	2.510.078	0,709149277	0,131868

INDIKATOR	KODE	KETERANGAN	2017																
			KBLM	BRAM	HDTX	TCID	PSDN	SKL	ULTJ	KICI	SULI	IKAI	BRPT	DPNS	SRSN	TPIA	G DST	NIKL	PICO
KATEGORI EKONOMI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KATEGORI LINGKUNGAN																			
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

















	P R 4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P R 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Komunikasi Pemasaran	P R 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P R 7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Privasi Pelanggan	P R 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kepatuhan	P R 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KODE PERUSAHAAN			<b>K B L M</b>	<b>B R A M</b>	<b>H D T X</b>	<b>P C I D N</b>	<b>S K L T</b>	<b>U L T J</b>	<b>K I C I</b>	<b>S U L I</b>	<b>I K A I</b>	<b>B R P T</b>	<b>D P N S</b>	<b>S R S N</b>	<b>T P I A</b>	<b>G D S T</b>	<b>N I K L</b>	<b>P I C O</b>
TOTAL			2 0	3 4	8 8	2 0	1 5	1 8	1 5	1 4	1 6	1 3	1 7	1 5	1 9	1 4	2 1	1 0
TOTAL INDIKATOR CSR			9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1
CSRDij			0, 2 1 9 7 8	0, 3 7 6 2 6	0, 0 8 9 1 2	0, 1 6 8 3 5	0, 1 9 8 0 2	0, 1 6 8 3 5	0, 1 5 8 4 6	0, 1 7 8 2 4	0, 1 1 8 1 7	0, 1 8 8 1 3	0, 1 6 8 8 3	0, 1 4 8 7 3	0, 2 0 7 9 9	0, 1 8 8 4 6	0, 2 3 7 8 9	0, 1 0 9 6 9

INDIKATOR	KODE	KETERANGAN	2018																
			KBLM	BRAM	HDTX	TCLD	PSDN	SKLNT	UOLTJ	KICI	SULI	IKAI	BRPT	DPNS	SRSN	TPIA	G DST	NIKL	PICO
KATEGORI EKONOMI																			
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KATEGORI LINGKUNGAN																			
-Bahan	EN	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

















# Digital Repository Universitas Jember

Jasa	3	produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis																		
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KODE PERUSAHAAN			<b>K</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>G</b>	<b>NI</b>	<b>PI</b>		
			<b>L</b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>KL</b>	<b>LT</b>	<b>KI</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>PI</b>	<b>D</b>	<b>KL</b>	<b>C</b>		
			<b>M</b>	<b>M</b>	<b>X</b>	<b>D</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>J</b>	<b>CI</b>	<b>LI</b>	<b>AI</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>ST</b>	<b>KL</b>	<b>O</b>		
TOTAL			1	3		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			9	4	8	0	5	8	4	4	4	3	7	7	5	8	4	7	2	
TOTAL INDIKATOR CSR			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CSR Dj				0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
			#	3	0	0,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			R	7	8	2	6	9	5	5	5	4	8	8	6	9	5	8	3	
			E	3	7	1	4	7	3	3	3	2	6	6	4	7	3	6	1	
			F	6	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			!	2	1	7	3	0	4	4	4	5	1	1	3	0	4	1	6	
				6	2	8	5	2	6	6	6	7	3	3	5	2	6	3	8	













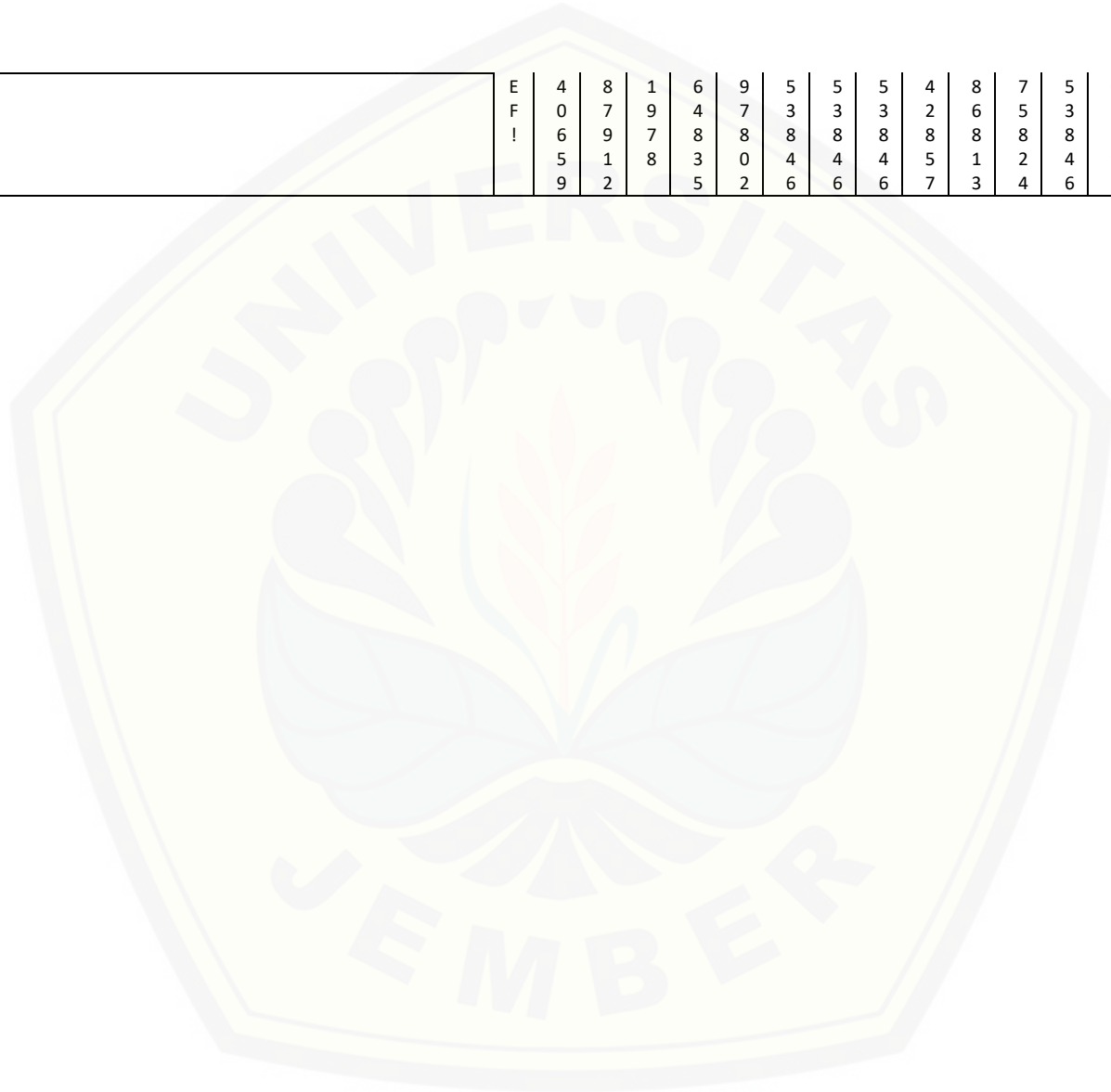




Asasi Manusia	2																	
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT																		
-Masyarakat Lokal	5 0 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
	5 0 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Anti-Korupsi	5 0 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 0 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 0 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kebijakan Publik	5 0 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Anti Persaingan	5 0 7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kepatuhan	5 0 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	5 0 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 0 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	5 0 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK																			
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	P R 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	P R 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Pelabelan Produk dan Jasa	P R 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	P R 4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P R 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Komunikasi Pemasaran	P R 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P R 7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Privasi Pelanggan	P R 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kepatuhan	P R 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KODE PERUSAHAAN			<b>K</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>G</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	
			<b>L</b>	<b>R</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>S</b>	<b>KL</b>	<b>LT</b>	<b>KI</b>	<b>R</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>R</b>	<b>D</b>	<b>NI</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	
			<b>M</b>	<b>M</b>	<b>X</b>	<b>D</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>J</b>	<b>CI</b>	<b>AI</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>ST</b>	<b>KL</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	
TOTAL			1	3		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL INDIKATOR CSR			6	1	8	0	5	8	4	4	4	7	6	4	9	2	5	2	
CSRDIj			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			#	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
			R	3	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	

	E	4	8	1	6	9	5	5	5	4	8	7	5	0	3	6	3
	F	0	7	9	4	7	3	3	3	2	6	5	3	8	1	4	1
	!	6	9	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8
		5	1	8	3	0	4	4	4	5	1	2	4	9	6	3	6
		9	2		5	2	6	6	6	7	3	4	6	1	8	5	8



**Lampiran 2. Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	51	.01	.50	.1035	.14923
X2	51	.05	8.18	.5779	1.55669
X3	51	.05	361.00	7.5471	50.48361
X4	51	3.00	8.00	4.1176	1.62046
X5	51	2.00	4.00	3.0392	.28006
Y1	51	.01	.71	.0787	.12722
Y2	51	.09	.37	.1795	.05721
Valid N (listwise)	51				



**Lampiran 3. Analisis Path**

**a. X – Z**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 <sup>a</sup>	.471	.412	.76034122

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.159	5	4.632	8.012	.000 <sup>b</sup>
	Residual	26.015	45	.578		
	Total	49.174	50			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.031	.110		-.277	.783
	X1	-.011	.215	-.010	-.052	.959
	X2	-.017	.154	-.016	-.113	.910
	X3	1.174	.317	.749	3.700	.001
	X4	-.003	.219	-.003	-.013	.989
	X5	-.078	.168	-.072	-.464	.645

a. Dependent Variable: Y1

**b. X, Z – Y**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.550 <sup>a</sup>	.303	.208	.89010332

a. Predictors: (Constant), Y1, X5, X2, X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y2

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.140	6	2.523	3.185	.011 <sup>b</sup>
	Residual	34.860	44	.792		
	Total	50.000	50			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), Y1, X5, X2, X4, X1, X3

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.018	.129		-.136	.893
	X1	.592	.252	.512	2.347	.023
	X2	.152	.180	.142	.844	.403
	X3	-.009	.424	-.005	-.020	.984
	X4	.328	.256	.283	1.278	.208
	X5	-.555	.198	-.506	-2.811	.007
	Y1	-.220	.175	-.218	-1.261	.214

a. Dependent Variable: Y2

**Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		51	51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	.72132302	.83499093
Most Extreme Differences	Absolute	.432	.114
	Positive	.432	.114
	Negative	-.286	-.097
Test Statistic		.432	.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 <sup>c</sup>	.094 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.031	.110		-.277	.783		
X1	-.011	.215	-.010	-.052	.959	.333	3.006
X2	-.017	.154	-.016	-.113	.910	.562	1.781
X3	1.174	.317	.749	3.700	.001	.287	3.485
X4	-.003	.219	-.003	-.013	.989	.324	3.084
X5	-.078	.168	-.072	-.464	.645	.492	2.033

a. Dependent Variable: Y1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------	-------------------------

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.018	.129		-.136	.893		
X1	.592	.252	.512	2.347	.023	.333	3.006
X2	.152	.180	.142	.844	.403	.561	1.781
X3	-.009	.424	-.005	-.020	.984	.220	4.545
X4	.328	.256	.283	1.278	.208	.324	3.084
X5	-.555	.198	-.506	-2.811	.007	.489	2.043
Y1	-.220	.175	-.218	-1.261	.214	.529	1.890

a. Dependent Variable: Y2

### c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.244	.104		2.345	.023
	X1	-.007	.203	-.009	-.033	.974
	X2	-.037	.145	-.051	-.255	.800
	X3	.033	.299	.031	.111	.912
	X4	.013	.207	.017	.065	.948
	X5	-.047	.159	-.063	-.298	.767

a. Dependent Variable: RES1

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.559	.072		7.744	.000
	X1	.428	.141	.643	1.040	.398
	X2	-.129	.101	-.209	-1.283	.206
	X3	.341	.237	.375	1.442	.156
	X4	-.104	.143	-.155	-.726	.472
	X5	-.056	.110	-.088	-.503	.617

Y1	-0.124	0.097	-0.213	-1.269	0.211
----	--------	-------	--------	--------	-------

a. Dependent Variable: RES2

**d. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 <sup>a</sup>	.471	.412	.76034122	1.942

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y1

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.550 <sup>a</sup>	.303	.208	.89010332	2.145

a. Predictors: (Constant), Y1, X5, X2, X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y2

**Lampiran 7. Uji Hipotesis**

**a. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.031	.110		-.277	.783
	X1	-.011	.215	-.010	-.052	.959
	X2	-.017	.154	-.016	-.113	.910
	X3	1.174	.317	.749	3.700	.001
	X4	-.003	.219	-.003	-.013	.989
	X5	-.078	.168	-.072	-.464	.645

a. Dependent Variable: Y1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.018	.129		-.136	.893
	X1	.592	.252	.512	2.347	.023
	X2	.152	.180	.142	.844	.403
	X3	-.009	.424	-.005	-.020	.984
	X4	.328	.256	.283	1.278	.208
	X5	-.555	.198	-.506	-2.811	.007
	Y1	-.220	.175	-.218	-1.261	.214

a. Dependent Variable: Y2